



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 79 TAHUN 2025

**TENTANG
RENCANA KERJA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2025**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, perlu menyusun Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu disusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

7. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 dan Menteri Keuangan Nomor 1/MK.2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Pemanfaatan Klasifikasi Rincian *Output* dan Rincian *Output* dalam Perencanaan dan Penganggaran;
8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-867/MK.02/2024 tanggal 23 September 2024 Perihal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG RANCANGAN KERJA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dan anggaran, serta digunakan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan serta pelaporan dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025.

- KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai bahan masukan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025.
- KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
- KELIMA : Dalam hal terdapat perubahan pada Rencana Kerja sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, maka dokumen perubahan tersebut akan disampaikan oleh Sekretaris Utama atau Pejabat yang ditunjuk pada Unit Organisasi Eselon I, Inspektorat, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, dan Pusat Data dan Informasi.
- KEENAM : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KELIMA dilakukan oleh setiap pimpinan unit organisasi dan disampaikan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 03 Juni 2025

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP



Arif Rachman



REKAP 1: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
2. VISI : Terwujudnya LKPP sebagai Penggerak Utama Transformasi Pengadaan yang Inklusif, Kredibel dan Berkelanjutan Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045
3. MISI : 1. Memperkuat transformasi tata kelola peningkatan kinerja pengadaan yang inklusif, kredibel, dan berkelanjutan
2. Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2025 (RIBU)
02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	140.639,0
03	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	1.159.857,0
05	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1.033.843,0
Total		2.334.339,0

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Meningkatnya kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional		17.537.947,0
01.01	Indeks kinerja pengadaan	49,88	
02	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan		19.731.144,0
02.01	Indeks penerapan tata kelola pengadaan	59,96	
03	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP		129.442.903,0
03.01	Nilai Reformasi Birokrasi	A	
Total			166.711.994,0

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2026	2027	2028
106.CJ	Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	37.269.091,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37.269.091,0	0,0	0,0	0,0
106.WA	Program Dukungan Manajemen	129.442.903,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129.442.903,0	0,0	0,0	0,0
Total		166.711.994,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166.711.994,0	0,0	0,0	0,0

REKAP 1A: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
2. VISI : Terwujudnya LKPP sebagai Penggerak Utama Transformasi Pengadaan yang Inklusif, Kredibel dan Berkelanjutan Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045
3. MISI : 1. Memperkuat transformasi tata kelola peningkatan kinerja pengadaan yang inklusif, kredibel, dan berkelanjutan
2. Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2025 (RIBU)
02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	140.639,0
03	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	1.159.857,0
05	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1.033.843,0
Total		2.334.339,0

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Meningkatnya kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional		17.537.947,0
01.01	Indeks kinerja pengadaan	49,88	
02	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan		19.731.144,0
02.01	Indeks penerapan tata kelola pengadaan	59,96	
03	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP		129.442.903,0
03.01	Nilai Reformasi Birokrasi	A	
Total			166.711.994,0

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2026	2027	2028
106.CJ	Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	37.269.091,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37.269.091,0	0,0	0,0	0,0
106.WA	Program Dukungan Manajemen	129.442.903,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129.442.903,0	0,0	0,0	0,0
Total		166.711.994,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166.711.994,0	0,0	0,0	0,0

REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 01 - Meningkatnya kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional
02 - Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan
3. PROGRAM : Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional
4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2025 (RIBU)
02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	140.639,0
02.15	Ekosistem Ekonomi Sirkular	140.639,0
03	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	1.159.857,0
03.03	Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	1.159.857,0
05	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1.033.843,0
05.05	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	1.033.843,0
Total		2.334.339,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Meningkatnya kinerja pengadaan melalui transformasi digital		10.484.655,0
01.01	Persentase digitalisasi proses pelaksanaan PBJ	57	
01.02	Indeks kepuasan pengguna platform pengadaan nasional	81.45	
01.03	Jumlah inovasi pengembangan platform pengadaan nasional	6	
02	Meningkatnya dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional		5.494.490,0

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
02.01	Persentase transaksi pengadaan yang mendukung sasaran pembangunan transformasi ekonomi	42	
02.02	Persentase transaksi produk ber-TKDN pada pasar digital pengadaan	10	
02.03	Persentase tingkat persaingan penyedia UMKK	11	
02.04	Persentase K/L/Pemda yang menerapkan belanja pengadaan untuk PDN minimal 95%	50	
02.05	Persentase K/L/Pemda yang menerapkan belanja pengadaan untuk UMKK minimal 40%	95	
03	Meningkatnya kualitas kepatuhan pelaksanaan pengadaan		1.558.802,0
03.01	Persentase efisiensi paket konsolidasi	15	
03.02	Skor efektivitas probity advice dan advokasi	100	
03.03	Persentase K/L/Pemda yang mengalami peningkatan nilai pengelolaan PBJ	10	
04	Meningkatnya kualitas implementasi regulasi PBJ		5.640.680,0
04.01	Indeks efektivitas implementasi regulasi PBJ	Baik	
05	Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan PBJ		11.016.071,0
05.01	Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang kompeten	276	
05.02	Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3	467	
06	Meningkatnya efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan		3.074.393,0
06.01	Persentase efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan	59	
07	(Dihapus) Meningkatnya efektivitas advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan		0,0
Total			37.269.091,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2025 (RIBU)
Total		0,0

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2026	2027	2028
6319	Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	6.344.366,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.344.366,0	0,0	0,0	0,0
6320	Pengelolaan Sistem Informasi PBJ	10.484.655,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.484.655,0	0,0	0,0	0,0

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2026	2027	2028
6321	Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya	11.016.071,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.016.071,0	0,0	0,0	0,0
6322	Pengelolaan Advokasi dan Hukum	4.633.195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.633.195,0	0,0	0,0	0,0
6323	Pengelolaan dan Pembinaan Stakeholder PBJ	4.790.804,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.790.804,0	0,0	0,0	0,0
Total		37.269.091,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37.269.091,0	0,0	0,0	0,0

REKAP 2A: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
2. UNIT ORGANISASI : 01 - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 01 - Meningkatnya kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional
02 - Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan
4. PROGRAM : Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional

5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2025 (RIBU)
02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	140.639,0
02.15	Ekosistem Ekonomi Sirkular	140.639,0
03	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	1.159.857,0
03.03	Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	1.159.857,0
05	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1.033.843,0
05.05	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	1.033.843,0
Total		2.334.339,0

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Meningkatnya kinerja pengadaan melalui transformasi digital		10.484.655,0
01.01	Persentase digitalisasi proses pelaksanaan PBJ	57	
01.02	Indeks kepuasan pengguna platform pengadaan nasional	81.45	
01.03	Jumlah inovasi pengembangan platform pengadaan nasional	6	

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
02	Meningkatnya dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional		5.494.490,0
02.01	Persentase transaksi pengadaan yang mendukung sasaran pembangunan transformasi ekonomi	42	
02.02	Persentase transaksi produk ber-TKDN pada pasar digital pengadaan	10	
02.03	Persentase tingkat persaingan penyedia UMKK	11	
02.04	Persentase K/L/Pemda yang menerapkan belanja pengadaan untuk PDN minimal 95%	50	
02.05	Persentase K/L/Pemda yang menerapkan belanja pengadaan untuk UMKK minimal 40%	95	
03	Meningkatnya kualitas kepatuhan pelaksanaan pengadaan		1.558.802,0
03.01	Persentase efisiensi paket konsolidasi	15	
03.02	Skor efektivitas probity advice dan advokasi	100	
03.03	Persentase K/L/Pemda yang mengalami peningkatan nilai pengelolaan PBJ	10	
04	Meningkatnya kualitas implementasi regulasi PBJ		5.640.680,0
04.01	Indeks efektivitas implementasi regulasi PBJ	Baik	
05	Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan PBJ		11.016.071,0
05.01	Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang kompeten	276	
05.02	Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3	467	
06	Meningkatnya efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan		3.074.393,0
06.01	Persentase efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan	59	
Total			37.269.091,0

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2025 (RIBU)
Total		0,0

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2026	2027	2028
6319	Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	6.344.366,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.344.366,0	0,0	0,0	0,0
6320	Pengelolaan Sistem Informasi PBJ	10.484.655,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.484.655,0	0,0	0,0	0,0

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2026	2027	2028
6321	Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya	11.016.071,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.016.071,0	0,0	0,0	0,0
6322	Pengelolaan Advokasi dan Hukum	4.633.195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.633.195,0	0,0	0,0	0,0
6323	Pengelolaan dan Pembinaan Stakeholder PBJ	4.790.804,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.790.804,0	0,0	0,0	0,0
Total		37.269.091,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37.269.091,0	0,0	0,0	0,0

REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 03 - Meningkatkan kualitas penerapan tata kelola internal LKPP

3. PROGRAM : Program Dukungan Manajemen

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2025 (RIBU)
Total		0,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP		129.442.903,0
01.01	Persentase Efektivitas Tata Kelola Internal	59.66	
01.02	Nilai AKIP	Sangat Baik	
01.03	Opini BPK	WTP	
Total			129.442.903,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2025 (RIBU)
Total		0,0

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2026	2027	2028
5664	Pembinaan dan Pengawasan Tugas dan Fungsi LKPP	927.860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	927.860,0	0,0	0,0	0,0

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2026	2027	2028
6598	Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi, Tata Laksana dan Pelayanan Hukum	5.742.195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.742.195,0	0,0	0,0	0,0
6599	Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan	68.715.427,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68.715.427,0	0,0	0,0	0,0
6600	Pelayanan Hubungan Masyarakat, Tata Usaha dan Pengelolaan Operasional Perkantoran	44.938.473,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44.938.473,0	0,0	0,0	0,0
7033	Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Infrastruktur TIK	9.118.948,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.118.948,0	0,0	0,0	0,0
Total		129.442.903,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129.442.903,0	0,0	0,0	0,0

REKAP 2A: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
2. UNIT ORGANISASI : 01 - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 03 - Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP
4. PROGRAM : Program Dukungan Manajemen
5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2025 (RIBU)
Total		0,0

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP		129.442.903,0
01.01	Persentase Efektivitas Tata Kelola Internal	59.66	
01.02	Nilai AKIP	Sangat Baik	
01.03	Opini BPK	WTP	
Total			129.442.903,0

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2025 (RIBU)
Total		0,0

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2026	2027	2028
5664	Pembinaan dan Pengawasan Tugas dan Fungsi LKPP	927.860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	927.860,0	0,0	0,0	0,0
6598	Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi, Tata Laksana dan Pelayanan Hukum	5.742.195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.742.195,0	0,0	0,0	0,0
6599	Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan	68.715.427,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68.715.427,0	0,0	0,0	0,0
6600	Pelayanan Hubungan Masyarakat, Tata Usaha dan Pengelolaan Operasional Perkantoran	44.938.473,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44.938.473,0	0,0	0,0	0,0
7033	Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Infrastruktur TIK	9.118.948,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.118.948,0	0,0	0,0	0,0
Total		129.442.903,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129.442.903,0	0,0	0,0	0,0

REKAP 3A: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

2. PROGRAM : CJ - Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional

3. SASARAN PROGRAM : 04 - Meningkatkan kualitas implementasi regulasi PBJ

4. KEGIATAN : 6319 - Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 11 - Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa		3.899.868,0
01.01	Jumlah rumusan kebijakan pengadaan umum	1	
01.02	Jumlah rumusan kebijakan pengadaan khusus	2	
01.03	Jumlah rumusan kebijakan terkait pengadaan berkelanjutan	1	
01.04	Jumlah rekomendasi kebijakan pengadaan barang/jasa dalam kerja sama internasional	1	
Total			3.899.868,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa</i>										2.730.255,0
01.AAC	Peraturan Pemerintah										520.000,0
01.AAC.111	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik										520.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Pembentukan dan Rapat tim Panitia Antarkementerian										350.450,0
		Pusat	Pusat								350.450,0
	052 - Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsep										163.550,0
		Pusat	Pusat								163.550,0
	053 - Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah										6.000,0
		Pusat	Pusat								6.000,0
01.AAH	Peraturan lainnya										400.000,0
01.AAH.111	Rancangan Peraturan terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Publik										400.000,0
	051 - Identifikasi Permasalahan										140.400,0
		Pusat	Pusat								140.400,0
	052 - Penyusunan Rancangan Peraturan Terkait Pedoman Pengadaan Barang/Jasa										255.600,0
		Pusat	Pusat								255.600,0
	053 - Konsultasi Publik										4.000,0
		Pusat	Pusat								4.000,0
01.ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan										1.810.255,0
01.ABL.111	Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum										1.810.255,0
	051 - Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan										544.182,0
		Pusat	Pusat								544.182,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Diseminasi Implementasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum										691.993,0
		Pusat	Pusat								691.993,0
	053 - Penyusunan Rekomendasi										574.080,0
		Pusat	Pusat								574.080,0
Total											2.730.255,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa				2.730.255,0				0,0	0,0	0,0
01.AAC	Peraturan Pemerintah		PP/ RPP		520.000,0				0,0	0,0	0,0
01.AAC.111	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik	1	RPP		520.000,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.AAC.111.051	Pembentukan dan Rapat tim Panitia Antarkementerian	1,0	Rancangan	350.450,0	350.450,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AAC.111.052	Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsep	6,0	Rancangan	27.258,3	163.550,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
01.AAC.111.053	Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah	6,0	Kegiatan	1.000,0	6.000,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
01.AAH	Peraturan lainnya		peraturan/ Rancangan Peraturan/ Surat Keputusan		400.000,0				0,0	0,0	0,0
01.AAH.111	Rancangan Peraturan terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	1	Rancangan Peraturan		400.000,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
01.AAH.111.051	Identifikasi Permasalahan	4,0	Rancangan	35.100,0	140.400,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.AAH.111.052	Penyusunan Rancangan Peraturan Terkait Pedoman Pengadaan Barang/Jasa	4,0	Rancangan	63.900,0	255.600,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.AAH.111.053	Konsultasi Publik	2,0	Kegiatan	2.000,0	4.000,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
01.ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		1.810.255,0				0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.ABL.111	Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2	Rekomendasi Kebijakan		1.810.255,0	4	4	4	0,0	0,0	0,0
01.ABL.111.051	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan	1,0	Laporan	544.182,0	544.182,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.ABL.111.052	Diseminasi Implementasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	1,0	Laporan	691.993,0	691.993,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.ABL.111.053	Penyusunan Rekomendasi	4,0	Rekomendasi Kebijakan	143.520,0	574.080,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Total					2.730.255,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										TOTAL
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	
01	Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa		2.730.255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.730.255,0
01.AAC	Peraturan Pemerintah		520.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520.000,0
01.AAC.111	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik		520.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520.000,0
01.AAC.111.051	Pembentukan dan Rapat tim Panitia Antarkementerian	Utama	350.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350.450,0
01.AAC.111.052	Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi	Utama	163.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163.550,0
01.AAC.111.053	Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah	Utama	6.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.000,0
01.AAH	Peraturan lainnya		400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
01.AAH.111	Rancangan Peraturan terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Publik		400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
01.AAH.111.051	Identifikasi Permasalahan	Utama	140.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140.400,0
01.AAH.111.052	Penyusunan Rancangan Peraturan Terkait Pedoman Pengadaan Barang/Jasa	Utama	255.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255.600,0
01.AAH.111.053	Konsultasi Publik	Utama	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0
01.ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan		1.810.255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.810.255,0
01.ABL.111	Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum		1.810.255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.810.255,0
01.ABL.111.051	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan	Utama	544.182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	544.182,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.ABL.111.052	Diseminasi Implementasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Utama	691.993,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	691.993,0
01.ABL.111.053	Penyusunan Rekomendasi	Utama	574.080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	574.080,0
Total			2.730.255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.730.255,0

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
2. PROGRAM : CJ - Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional
3. SASARAN PROGRAM : 02 - Meningkatkan dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional
4. KEGIATAN : 6323 - Pengelolaan dan Pembinaan Stakeholder PBJ
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 11 - Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
02	Meningkatnya partisipasi dan kompetisi UMKK		3.881.081,0
02.01	Jumlah penyedia UMKK yang on-boarding dalam sistem pengadaan digital	50	
02.02	Jumlah Partisipasi UMKK yang terlibat dalam PBJ	824.863	
Total			3.881.081,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
02	<i>Meningkatnya partisipasi dan kompetisi UMKK</i>										440.000,0
02.QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM										440.000,0
02.QDG.111	Penyedia UMK yang On-Boarding dalam Sistem Pengadaan Digital				Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif	Fasilitasi Kemitraan dan Akses Pasar			440.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Peningkatan Awareness Pemberdayaan UMK dalam PBJP										25.208,0
		Pusat	Pusat								25.208,0
	052 - Pembuatan Akun dan On- Boarding Pelaku UMK										380.902,0
		Pusat	Pusat								380.902,0
	053 - Business Matching bagi Pelaku UMK										33.890,0
		Pusat	Pusat								33.890,0
Total											440.000,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02	Meningkatnya partisipasi dan kompetisi UMKK				440.000,0				0,0	0,0	0,0
02.QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		UMKM		440.000,0				0,0	0,0	0,0
02.QDG.111	Penyedia UMK yang On-Boarding dalam Sistem Pengadaan Digital	50	UMKM		440.000,0	500	500	500	0,0	0,0	0,0
02.QDG.111.051	Peningkatan Awareness Pemberdayaan UMK dalam PBJP	2,0	Laporan	12.604,0	25.208,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
02.QDG.111.052	Pembuatan Akun dan On-Boarding Pelaku UMK	20,0	Laporan	19.045,1	380.902,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
02.QDG.111.053	Business Matching bagi Pelaku UMK	3,0	Kegiatan	11.296,7	33.890,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Total					440.000,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02	Meningkatnya partisipasi dan kompetisi UMKK		440.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440.000,0
02.QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		440.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440.000,0
02.QDG.111	Penyedia UMK yang On-Boarding dalam Sistem Pengadaan Digital		440.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440.000,0
02.QDG.111.051	Peningkatan Awareness Pemberdayaan UMK dalam PBJP	Utama	25.208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.208,0
02.QDG.111.052	Pembuatan Akun dan On-Boarding Pelaku UMK	Utama	380.902,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380.902,0
02.QDG.111.053	Business Matching bagi Pelaku UMK	Utama	33.890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33.890,0
Total			440.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440.000,0

REKAP 3A: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

2. PROGRAM : CJ - Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional

3. SASARAN PROGRAM : 04 - Meningkatkan kualitas implementasi regulasi PBJ

4. KEGIATAN : 6319 - Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 10 - Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa		3.899.868,0
01.01	Jumlah rumusan kebijakan pengadaan umum	1	
01.02	Jumlah rumusan kebijakan pengadaan khusus	2	
01.03	Jumlah rumusan kebijakan terkait pengadaan berkelanjutan	1	
01.04	Jumlah rekomendasi kebijakan pengadaan barang/jasa dalam kerja sama internasional	1	
02	Tercapainya desa yang memiliki maturitas pengadaan		1.200.000,0
02.01	Jumlah Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2	11	
03	Terselenggaranya Pendampingan PBJ Khusus		540.812,0
03.01	Persentase pemenuhan pendampingan PBJ khusus	100	
Total			5.640.680,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa										360.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										360.000,0
01.AFA.124	Model Dokumen PBJ Khusus										360.000,0
	051 - Pengumpulan Data dan Informasi										28.528,0
		Pusat	Pusat								28.528,0
	052 - Analisis Data, Informasi dan Kebijakan										46.128,0
		Pusat	Pusat								46.128,0
	053 - Penyusunan Draft Pedoman/Model Dokumen										285.344,0
		Pusat	Pusat								285.344,0
02	<i>Tercapainya desa yang memiliki maturitas pengadaan</i>										1.200.000,0
02.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa										1.200.000,0
02.UBB.121	Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2										1.200.000,0
	051 - Persiapan pelaksanaan pengukuran maturitas desa										42.725,0
		Pusat	Pusat								42.725,0
	052 - Pelaksanaan Pengukuran Tingkat Kematangan Pengadaan Barang/Jasa Desa										1.142.350,0
		Pusat	Pusat								1.142.350,0
	053 - Finalisasi dan Monitoring Evaluasi Hasil Pengukuran Kematangan Desa										14.925,0
		Pusat	Pusat								14.925,0
03	<i>Terselenggaranya Pendampingan PBJ Khusus</i>										540.812,0
03.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga										540.812,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
03.BDB.123	Instansi/proyek yang mendapatkan pendampingan/diberikan pendapat dalam PBJ Khusus										540.812,0
	051 - Persiapan Pendampingan/Pemberian Pendapat										9.673,0
		Pusat	Pusat								9.673,0
	052 - Pelaksanaan Pendampingan/Pemberian Pendapat										449.569,0
		Pusat	Pusat								449.569,0
	053 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi										81.570,0
		Pusat	Pusat								81.570,0
Total											2.100.812,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa				360.000,0				0,0	0,0	0,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		NSPK/ Rancangan Standar/ Pedoman/ Standar		360.000,0				0,0	0,0	0,0
01.AFA.124	Model Dokumen PBJ Khusus	2	NSPK		360.000,0	4	3	3	0,0	0,0	0,0
01.AFA.124.051	Pengumpulan Data dan Informasi	2,0	Kegiatan	14.264,0	28.528,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.124.052	Analisis Data, Informasi dan Kebijakan	2,0	Kegiatan	23.064,0	46.128,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.124.053	Penyusunan Draft Pedoman/Model Dokumen	2,0	Dokumen	142.672,0	285.344,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
02	Tercapainya desa yang memiliki maturitas pengadaan				1.200.000,0				0,0	0,0	0,0
02.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa		Desa/ DesaKelurahan		1.200.000,0				0,0	0,0	0,0
02.UBB.121	Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2	1	Desa		1.200.000,0	18	320	1000	0,0	0,0	0,0
02.UBB.121.051	Persiapan pelaksanaan pengukuran maturitas desa	1,0	Laporan	42.725,0	42.725,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02.UBB.121.052	Pelaksanaan Pengukuran Tingkat Kematangan Pengadaan Barang/Jasa Desa	2,0	Laporan	571.175,0	1.142.350,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
02.UBB.121.053	Finalisasi dan Monitoring Evaluasi Hasil Pengukuran Kematangan Desa	1,0	Laporan	14.925,0	14.925,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03	Terselenggaranya Pendampingan PBJ Khusus				540.812,0				0,0	0,0	0,0
03.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		Lembaga/ Unit Kerja/ Tim		540.812,0				0,0	0,0	0,0
03.BDB.123	Instansi/proyek yang mendapatkan pendampingan/diberikan pendapat dalam PBJ Khusus	5	Lembaga		540.812,0	14	14	15	0,0	0,0	0,0
03.BDB.123.051	Persiapan Pendampingan/Pemberian Pendapat	5,0	Kegiatan	1.934,6	9.673,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
03.BDB.123.052	Pelaksanaan Pendampingan/Pemberian Pendapat	5,0	Kegiatan	89.913,8	449.569,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
03.BDB.123.053	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	2,0	Laporan	40.785,0	81.570,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Total					2.100.812,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa		360.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360.000,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		360.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360.000,0
01.AFA.124	Model Dokumen PBJ Khusus		360.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360.000,0
01.AFA.124.051	Pengumpulan Data dan Informasi	Utama	28.528,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28.528,0
01.AFA.124.052	Analisis Data, Informasi dan Kebijakan	Utama	46.128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46.128,0
01.AFA.124.053	Penyusunan Draft Pedoman/Model Dokumen	Utama	285.344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285.344,0
02	Tercapainya desa yang memiliki maturitas pengadaan		1.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200.000,0
02.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa		1.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200.000,0
02.UBB.121	Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2		1.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200.000,0
02.UBB.121.051	Persiapan pelaksanaan pengukuran maturitas desa	Utama	42.725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42.725,0
02.UBB.121.052	Pelaksanaan Pengukuran Tingkat Kematangan Pengadaan Barang/Jasa Desa	Utama	1.142.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.142.350,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.UBB.121.053	Finalisasi dan Monitoring Evaluasi Hasil Pengukuran Kematangan Desa	Utama	14.925,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.925,0
03	Terselenggaranya Pendampingan PBJ Khusus		540.812,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540.812,0
03.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		540.812,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540.812,0
03.BDB.123	Instansi/proyek yang mendapatkan pendampingan/diberikan pendapat dalam PBJ Khusus		540.812,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540.812,0
03.BDB.123.051	Persiapan Pendampingan/Pemberian Pendapat	Utama	9.673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.673,0
03.BDB.123.052	Pelaksanaan Pendampingan/Pemberian Pendapat	Utama	449.569,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449.569,0
03.BDB.123.053	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Utama	81.570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81.570,0
Total			2.100.812,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.100.812,0

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
2. PROGRAM : CJ - Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional
3. SASARAN PROGRAM : 02 - Meningkatnya dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional
04 - Meningkatnya kualitas implementasi regulasi PBJ
4. KEGIATAN : 6319 - Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 09 - Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa		3.899.868,0
01.01	Jumlah rumusan kebijakan pengadaan umum	1	
01.02	Jumlah rumusan kebijakan pengadaan khusus	2	
01.03	Jumlah rumusan kebijakan terkait pengadaan berkelanjutan	1	
01.04	Jumlah rekomendasi kebijakan pengadaan barang/jasa dalam kerja sama internasional	1	
04	Meningkatnya pemanfaatan produk berkelanjutan pada sistem pengadaan		703.686,0
04.01	Persentase peningkatan rencana pengadaan berkelanjutan dalam SIRUP	9	
Total			4.603.554,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa</i>										809.613,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.PAH	Peraturan lainnya										140.639,0
01.PAH.131	Rancangan Peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan				Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ekosistem Ekonomi Sirkular	Pengembangan Produk Ramah Lingkungan	Pengembangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan Prinsip Berkelanjutan			140.639,0
	051 - Persiapan Pelaksanaan Kegiatan										16.351,0
		Pusat	Pusat								16.351,0
	052 - Analisis Data dan Informasi										51.886,0
		Pusat	Pusat								51.886,0
	053 - Penyusunan Rancangan Peraturan										72.402,0
		Pusat	Pusat								72.402,0
01.PEC	Kerja sama										668.974,0
01.PEC.131	Kerjasama di bidang PBJP dengan negara mitra/organisasi internasional/lembaga internasional				Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Peningkatan Utilisasi FTA/CEPA untuk Mendorong Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Peningkatan Kesepakatan dan Proses Ratifikasi Perundingan Perdagangan			668.974,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Perundingan Internasional										321.399,0
		Pusat	Pusat								321.399,0
	052 - Kerjasama dengan Organisasi Internasional/Mitra Pembangunan serta Kerjasama Internasional lainnya										259.495,0
		Pusat	Pusat								259.495,0
	053 - Penyusunan Rancangan Peraturan Kajian/Telaahan dalam rangka Kerjasama di Bidang PBJP dengan Negara Mitra/Organisasi Internasional/Lembaga Internasional										88.080,0
		Pusat	Pusat								88.080,0
04	<i>Meningkatnya pemanfaatan produk berkelanjutan pada sistem pengadaan</i>										703.686,0
04.PDA	Standarisasi Produk										337.237,0
04.PDA.131	Produk ramah lingkungan/berkelanjutan yang masuk dalam sistem pengadaan pemerintah										337.237,0
	051 - Pengumpulan Data dan Informasi										43.028,0
		Pusat	Pusat								43.028,0
	052 - Onboarding Produk										239.790,0
		Pusat	Pusat								239.790,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Monitoring dan Evaluasi										54.419,0
		Pusat	Pusat								54.419,0
04.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga										366.449,0
04.QDB.131	K/L/Pemda yang menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan/ berkelanjutan										366.449,0
	051 - Persiapan Pelaksanaan Kegiatan										20.218,0
		Pusat	Pusat								20.218,0
	052 - Pelaksanaan Kegiatan										288.981,0
		Pusat	Pusat								288.981,0
	053 - Monitoring Pelaksanaan Kegiatan										57.250,0
		Pusat	Pusat								57.250,0
Total											1.513.299,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa				809.613,0				0,0	0,0	0,0
01.PAH	Peraturan lainnya		peraturan/ Rancangan Peraturan/ Surat Keputusan		140.639,0				0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.PAH.131	Rancangan Peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan	1	Rancangan Peraturan		140.639,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
01.PAH.131.051	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	1,0	Kegiatan	16.351,0	16.351,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.PAH.131.052	Analisis Data dan Informasi	1,0	Kegiatan	51.886,0	51.886,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.PAH.131.053	Penyusunan Rancangan Peraturan	1,0	Rancangan Dokumen	72.402,0	72.402,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.PEC	Kerja sama		Kesepakatan/ Dokumen/ Kegiatan		668.974,0				0,0	0,0	0,0
01.PEC.131	Kerjasama di bidang PBJP dengan negara mitra/organisasi internasional/lembaga internasional	2	Kegiatan		668.974,0	8	8	8	0,0	0,0	0,0
01.PEC.131.051	Perundingan Internasional	1,0	Kegiatan	321.399,0	321.399,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.PEC.131.052	Kerjasama dengan Organisasi Internasional/Mitra Pembangunan serta Kerjasama Internasional lainnya	1,0	Kegiatan	259.495,0	259.495,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.PEC.131.053	Penyusunan Rancangan Peraturan Kajian/Telaahan dalam rangka Kerjasama di Bidang PBJP dengan Negara Mitra/Organisasi Internasional/Lembaga Internasional	1,0	Rancangan Dokumen	88.080,0	88.080,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
04	Meningkatnya pemanfaatan produk berkelanjutan pada sistem pengadaan				703.686,0				0,0	0,0	0,0
04.PDA	Standarisasi Produk		produk/ Ekor/ Peralatan/ Rekomendasi/ Standar		337.237,0				0,0	0,0	0,0
04.PDA.131	Produk ramah lingkungan/berkelanjutan yang masuk dalam sistem pengadaan pemerintah	2	produk		337.237,0	4	4	4	0,0	0,0	0,0
04.PDA.131.051	Pengumpulan Data dan Informasi	2,0	Kegiatan	21.514,0	43.028,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
04.PDA.131.052	Onboarding Produk	1,0	Kegiatan	239.790,0	239.790,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
04.PDA.131.053	Monitoring dan Evaluasi	2,0	Dokumen	27.209,5	54.419,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
04.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		Lembaga/ Unit Kerja/ Tim		366.449,0				0,0	0,0	0,0
04.QDB.131	K/L/Pemda yang menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan/ berkelanjutan	2	Lembaga		366.449,0	5	5	5	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
04.QDB.131.051	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	2,0	Kegiatan	10.109,0	20.218,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
04.QDB.131.052	Pelaksanaan Kegiatan	2,0	Kegiatan	144.490,5	288.981,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
04.QDB.131.053	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan	2,0	Dokumen	28.625,0	57.250,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Total					1.513.299,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa		809.613,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	809.613,0
01.PAH	Peraturan lainnya		140.639,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140.639,0
01.PAH.131	Rancangan Peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan		140.639,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140.639,0
01.PAH.131.051	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Utama	16.351,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.351,0
01.PAH.131.052	Analisis Data dan Informasi	Utama	51.886,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51.886,0
01.PAH.131.053	Penyusunan Rancangan Peraturan	Utama	72.402,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72.402,0
01.PEC	Kerja sama		668.974,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	668.974,0
01.PEC.131	Kerjasama di bidang PBJP dengan negara mitra/organisasi internasional/lembaga internasional		668.974,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	668.974,0
01.PEC.131.051	Perundingan Internasional	Utama	321.399,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	321.399,0
01.PEC.131.052	Kerjasama dengan Organisasi Internasional/Mitra Pembangunan serta Kerjasama Internasional lainnya	Utama	259.495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259.495,0
01.PEC.131.053	Penyusunan Rancangan Peraturan Kajian/Telaahan dalam rangka Kerjasama di Bidang PBJP dengan Negara Mitra/Organisasi Internasional/Lembaga Internasional	Utama	88.080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88.080,0
04	Meningkatnya pemanfaatan produk berkelanjutan pada sistem pengadaan		703.686,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	703.686,0
04.PDA	Standarisasi Produk		337.237,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	337.237,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
04.PDA.131	Produk ramah lingkungan/berkelanjutan yang masuk dalam sistem pengadaan pemerintah		337.237,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	337.237,0
04.PDA.131.051	Pengumpulan Data dan Informasi	Utama	43.028,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43.028,0
04.PDA.131.052	Onboarding Produk	Utama	239.790,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239.790,0
04.PDA.131.053	Monitoring dan Evaluasi	Utama	54.419,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54.419,0
04.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		366.449,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	366.449,0
04.QDB.131	K/L/Pemda yang menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan/ berkelanjutan		366.449,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	366.449,0
04.QDB.131.051	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Utama	20.218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.218,0
04.QDB.131.052	Pelaksanaan Kegiatan	Utama	288.981,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288.981,0
04.QDB.131.053	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan	Utama	57.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57.250,0
Total			1.513.299,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.513.299,0

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

2. PROGRAM : CJ - Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional

3. SASARAN PROGRAM : 02 - Meningkatkan dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional

4. KEGIATAN : 6323 - Pengelolaan dan Pembinaan Stakeholder PBJ

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 09 - Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
02	Meningkatnya partisipasi dan kompetisi UMKK		3.881.081,0
02.01	Jumlah penyedia UMKK yang on-boarding dalam sistem pengadaan digital	50	
02.02	Jumlah Partisipasi UMKK yang terlibat dalam PBJ	824.863	
Total			3.881.081,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
02	<i>Meningkatnya partisipasi dan kompetisi UMKK</i>										1.084.726,0
02.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat										364.869,0
02.QDC.131	Pemangku kepentingan yang mendapatkan akses informasi mengenai PBJP dalam kerangka kerjasama internasional				Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berkas Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Peningkatan Utilisasi FTA/CEPA untuk Mendorong Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Peninjauan dan Sinkronisasi Regulasi Perdagangan Dalam Negeri untuk Mengoptimalkan Utilisasi FTA/CEPA			364.869,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Persiapan Kegiatan Pemberian Informasi Pengadaan Dalam Kerangka Kerjasama Internasional										129.796,0
		Pusat	Pusat								129.796,0
	052 - Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan Pemberian Informasi Pengadaan Dalam Kerangka Kerjasama Internasional										235.073,0
		Pusat	Pusat								235.073,0
02.QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM										719.857,0
02.QDG.131	Pelaku Usaha UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBj				Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif	Fasilitasi Kemitraan dan Akses Pasar			719.857,0
	051 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah										641.717,0
		Pusat	Pusat								641.717,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Forum Komunikasi Pelaku Usaha										78.140,0
		Pusat	Pusat								78.140,0
Total											1.084.726,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02	Meningkatnya partisipasi dan kompetisi UMKK				1.084.726,0				0,0	0,0	0,0
02.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		Orang		364.869,0				0,0	0,0	0,0
02.QDC.131	Pemangku kepentingan yang mendapatkan akses informasi mengenai PBJP dalam kerangka kerjasama internasional	200	Orang		364.869,0	450	400	350	0,0	0,0	0,0
02.QDC.131.051	Persiapan Kegiatan Pemberian Informasi Pengadaan Dalam Kerangka Kerjasama Internasional	2,0	Dokumen	64.898,0	129.796,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
02.QDC.131.052	Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan Pemberian Informasi Pengadaan Dalam Kerangka Kerjasama Internasional	2,0	Kegiatan	117.536,5	235.073,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
02.QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		UMKM		719.857,0				0,0	0,0	0,0
02.QDG.131	Pelaku Usaha UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ	500	UMKM		719.857,0	1500	1500	1500	0,0	0,0	0,0
02.QDG.131.051	Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3,0	Kegiatan	213.905,7	641.717,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
02.QDG.131.052	Forum Komunikasi Pelaku Usaha	1,0	Kegiatan	78.140,0	78.140,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Total					1.084.726,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02	Meningkatnya partisipasi dan kompetisi UMKK		1.084.726,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084.726,0
02.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		364.869,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	364.869,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.QDC.131	Pemangku kepentingan yang mendapatkan akses informasi mengenai PBJP dalam kerangka kerjasama internasional		364.869,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	364.869,0
02.QDC.131.051	Persiapan Kegiatan Pemberian Informasi Pengadaan Dalam Kerangka Kerjasama Internasional	Utama	129.796,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129.796,0
02.QDC.131.052	Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan Pemberian Informasi Pengadaan Dalam Kerangka Kerjasama Internasional	Utama	235.073,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235.073,0
02.QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		719.857,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	719.857,0
02.QDG.131	Pelaku Usaha UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ		719.857,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	719.857,0
02.QDG.131.051	Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Utama	641.717,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	641.717,0
02.QDG.131.052	Forum Komunikasi Pelaku Usaha	Utama	78.140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78.140,0
Total			1.084.726,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084.726,0

REKAP 3A: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

2. PROGRAM : CJ - Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional

3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatkan kinerja pengadaan melalui transformasi digital

4. KEGIATAN : 6320 - Pengelolaan Sistem Informasi PBJ

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 12 - Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PBJ Nasional		1.117.900,0
01.01	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan PBJ Nasional	2	
01.02	Jumlah laporan monitoring mingguan pelaksanaan PBJ Nasional	52	
01.03	Jumlah laporan monitoring mingguan pelaksanaan PBJ pada K/L dan Pemda	52	
01.04	Jumlah buku profil pengadaan barang/jasa pemerintah	1	
01.05	Jumlah kajian pengembangan platform pengadaan nasional	2	
03	Meningkatnya kualitas perencanaan pengadaan pada K/L/Pemda		845.456,0
03.01	Jumlah K/L/Pemda yang mendapatkan bimbingan teknis perencanaan pengadaan berbasis data pengadaan	124	
03.02	Jumlah K/L/Pemda yang mendapatkan pendampingan berbasis kajian evaluasi pelaksanaan PBJ	50	
Total			1.963.356,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PBJ Nasional</i>										1.117.900,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan										1.117.900,0
01.FAE.211	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJP										1.117.900,0
	051 - Monitoring Pelaksanaan PBJP Nasional										528.000,0
		Pusat	Pusat								528.000,0
	052 - Penilaian Indeks Kinerja Pengadaan Nasional										589.900,0
		Pusat	Pusat								589.900,0
03	<i>Meningkatnya kualitas perencanaan pengadaan pada K/L/Pemda</i>										845.456,0
03.BAH	Pelayanan Publik Lainnya										845.456,0
03.BAH.211	Layanan Sistem Perencanaan Monitoring dan Evaluasi PBJP										845.456,0
	051 - Penyelenggaraan Sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi PBJP										307.820,0
		Pusat	Pusat								307.820,0
	052 - Penyelenggaraan Layanan/Regulasi dan Sistem Perencanaan - Monev PBJP										537.636,0
		Pusat	Pusat								537.636,0
Total											1.963.356,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PBJ Nasional				1.117.900,0				0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		Laporan/ Rekomendasi		1.117.900,0				0,0	0,0	0,0
01.FAE.211	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJP	3	Laporan		1.117.900,0	4	4	4	0,0	0,0	0,0
01.FAE.211.051	Monitoring Pelaksanaan PBJP Nasional	2,0	Laporan	264.000,0	528.000,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
01.FAE.211.052	Penilaian Indeks Kinerja Pengadaan Nasional	1,0	Laporan	589.900,0	589.900,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03	Meningkatnya kualitas perencanaan pengadaan pada K/L/Pemda				845.456,0				0,0	0,0	0,0
03.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		layanannya/ bidang/ dokumen/ Miliar Rp/ titik		845.456,0				0,0	0,0	0,0
03.BAH.211	Layanan Sistem Perencanaan Monitoring dan Evaluasi PBJP	2	layanannya		845.456,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
03.BAH.211.051	Penyelenggaraan Sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi PBJP	2,0	Kegiatan	153.910,0	307.820,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
03.BAH.211.052	Penyelenggaraan Layanan/ Regulasi dan Sistem Perencanaan - Monev PBJP	2,0	Kegiatan	268.818,0	537.636,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Total					1.963.356,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PBJ Nasional		1.117.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.117.900,0
01.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1.117.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.117.900,0
01.FAE.211	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJP		1.117.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.117.900,0
01.FAE.211.051	Monitoring Pelaksanaan PBJP Nasional	Utama	528.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	528.000,0
01.FAE.211.052	Penilaian Indeks Kinerja Pengadaan Nasional	Utama	589.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	589.900,0
03	Meningkatnya kualitas perencanaan pengadaan pada K/L/Pemda		845.456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	845.456,0
03.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		845.456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	845.456,0
03.BAH.211	Layanan Sistem Perencanaan Monitoring dan Evaluasi PBJP		845.456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	845.456,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.BAH.211.051	Penyelenggaraan Sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi PBJP	Utama	307.820,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307.820,0
03.BAH.211.052	Penyelenggaraan Layanan/ Regulasi dan Sistem Perencanaan - Monev PBJP	Utama	537.636,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	537.636,0
Total			1.963.356,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.963.356,0

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

2. PROGRAM : CJ - Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional

3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya kinerja pengadaan melalui transformasi digital

4. KEGIATAN : 6320 - Pengelolaan Sistem Informasi PBJ

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 08 - Direktorat Sistem Pengadaan Digital

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
02	Terselenggaranya platform pengadaan nasional dan pengembangan platform pengadaan nasional		8.521.299,0
02.01	Jumlah layanan pengembangan platform pengadaan nasional	1	
02.02	Jumlah layanan penyelenggaraan SPSE dan sistem pendukung	1	
02.03	Jumlah modul aplikasi integrasi pasar digital pengadaan	1	
Total			8.521.299,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
02	<i>Terselenggaranya platform pengadaan nasional dan pengembangan platform pengadaan nasional</i>										7.521.299,0
02.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan										7.521.299,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
02.FAB.221	Layanan Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Digital										7.521.299,0
	051 - Layanan Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Digital										7.521.299,0
		Pusat	Pusat								7.521.299,0
Total											7.521.299,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02	Terselenggaranya platform pengadaan nasional dan pengembangan platform pengadaan nasional				7.521.299,0				0,0	0,0	0,0
02.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan		Sistem Informasi/ Modul Aplikasi/ Layanan		7.521.299,0				0,0	0,0	0,0
02.FAB.221	Layanan Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Digital	1	Layanan		7.521.299,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
02.FAB.221.051	Layanan Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Digital	1,0	Layanan	7.521.299,0	7.521.299,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Total					7.521.299,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02	Terselenggaranya platform pengadaan nasional dan pengembangan platform pengadaan nasional		7.521.299,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.521.299,0
02.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan		7.521.299,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.521.299,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.FAB.221	Layanan Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Digital		7.521.299,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.521.299,0
02.FAB.221.051	Layanan Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Digital	Utama	7.521.299,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.521.299,0
Total			7.521.299,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.521.299,0

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
2. PROGRAM : CJ - Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya kinerja pengadaan melalui transformasi digital
4. KEGIATAN : 6320 - Pengelolaan Sistem Informasi PBJ
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 16 - Direktorat Pasar Digital Pengadaan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
02	Terselenggaranya platform pengadaan nasional dan pengembangan platform pengadaan nasional		8.521.299,0
02.01	Jumlah layanan pengembangan platform pengadaan nasional	1	
02.02	Jumlah layanan penyelenggaraan SPSE dan sistem pendukung	1	
02.03	Jumlah modul aplikasi integrasi pasar digital pengadaan	1	
Total			8.521.299,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
02	<i>Terselenggaranya platform pengadaan nasional dan pengembangan platform pengadaan nasional</i>										1.000.000,0
02.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan										1.000.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
02.UAB.231	Sistem Pasar Digital Pengadaan Terintegrasi										1.000.000,0
	051 - Penyusunan Proses Bisnis										458.285,0
		Pusat	Pusat								458.285,0
	052 - Pengintegrasian Sistem										285.554,0
		Pusat	Pusat								285.554,0
	053 - Diseminasi Proses Bisnis Katalog Elektronik										256.161,0
		Pusat	Pusat								256.161,0
Total											1.000.000,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02	Terselenggaranya platform pengadaan nasional dan pengembangan platform pengadaan nasional				1.000.000,0				0,0	0,0	0,0
02.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan		Sistem Informasi		1.000.000,0				0,0	0,0	0,0
02.UAB.231	Sistem Pasar Digital Pengadaan Terintegrasi	1	Modul Aplikasi		1.000.000,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
02.UAB.231.051	Penyusunan Proses Bisnis	2,0	Pedoman	229.142,5	458.285,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
02.UAB.231.052	Pengintegrasian Sistem	1,0	Kegiatan	285.554,0	285.554,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.UAB.231.053	Diseminasi Proses Bisnis Katalog Elektronik	1,0	Laporan	256.161,0	256.161,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Total					1.000.000,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02	Terselenggaranya platform pengadaan nasional dan pengembangan platform pengadaan nasional		1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
02.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan		1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
02.UAB.231	Sistem Pasar Digital Pengadaan Terintegrasi		1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
02.UAB.231.051	Penyusunan Proses Bisnis	Utama	458.285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	458.285,0
02.UAB.231.052	Pengintegrasian Sistem	Utama	285.554,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285.554,0
02.UAB.231.053	Diseminasi Proses Bisnis Katalog Elektronik	Utama	256.161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256.161,0
Total			1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
2. PROGRAM : CJ - Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional
3. SASARAN PROGRAM : 02 - Meningkatnya dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional
4. KEGIATAN : 6323 - Pengelolaan dan Pembinaan Stakeholder PBJ
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 16 - Direktorat Pasar Digital Pengadaan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
03	Meningkatnya produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan		909.723,0
03.01	Jumlah produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan	200.000	
Total			909.723,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
03	<i>Meningkatnya produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan</i>										909.723,0
03.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk										909.723,0
03.BIA.231	Produk Hasil Kurasi pada Pasar Digital Pengadaan										909.723,0
	051 - Pengelolaan Kategori dan Kurasi Produk										517.246,0
		Pusat	Pusat								517.246,0
	052 - Pengelolaan Koleksi Produk										392.477,0
		Pusat	Pusat								392.477,0
Total											909.723,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
03	Meningkatnya produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan				909.723,0				0,0	0,0	0,0
03.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk		Produk/ Laporan/ Keputusan		909.723,0				0,0	0,0	0,0
03.BIA.231	Produk Hasil Kurasi pada Pasar Digital Pengadaan	200000	Produk		909.723,0	200000	200000	200000	0,0	0,0	0,0
03.BIA.231.051	Pengelolaan Kategori dan Kurasi Produk	1,0	Kegiatan	517.246,0	517.246,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03.BIA.231.052	Pengelolaan Koleksi Produk	1,0	Kegiatan	392.477,0	392.477,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Total					909.723,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03	Meningkatnya produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan		909.723,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	909.723,0
03.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk		909.723,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	909.723,0
03.BIA.231	Produk Hasil Kurasi pada Pasar Digital Pengadaan		909.723,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	909.723,0
03.BIA.231.051	Pengelolaan Kategori dan Kurasi Produk	Utama	517.246,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	517.246,0
03.BIA.231.052	Pengelolaan Koleksi Produk	Utama	392.477,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392.477,0
Total			909.723,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	909.723,0

REKAP 3A: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

2. PROGRAM : CJ - Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional

3. SASARAN PROGRAM : 05 - Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan PBJ

4. KEGIATAN : 6321 - Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 14 - Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten		8.031.628,0
01.01	Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda	10570	
01.02	Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi okupasi	1675	
01.03	Jumlah SDM PBJ Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kepala UKPBJ yang Kompeten	10	
01.04	Jumlah Peserta Pelatihan Fungsional dan Teknis Fungsional PBJ	950	
01.05	Jumlah Peserta Pelatihan Okupasi PBJ	6700	
01.06	Jumlah Peserta Pelatihan Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan/atau Kepala UKPBJ	1110	
01.07	Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi Tematik PBJ	9700	
01.08	Jumlah Peserta Pelatihan Anti korupsi PBJ	200	
01.09	Jumlah Peserta Pelatihan Teknis, Manajerial, dan Sosiokultural SDM PBJ	400	
01.10	Jumlah Peserta yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	4860	
01.11	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Okupasi	600	
01.12	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kompetensi Kepala UKPBJ	20	
01.13	Indeks Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi PBJ	70	
01.14	Persentase Layanan Penjaminan Mutu Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	98	
01.15	Persentase Tersedianya Perangkat Pembelajaran Pelatihan PBJ	100	

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
02	Meningkatnya kapabilitas UKPBj		2.984.443,0
02.01	Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBj yang mencapai maturitas minimal level 3	467	
02.02	Jumlah UKPBj yang telah siap menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan - Proaktif	1	
Total			11.016.071,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Terwujudnya SDM PBj yang kompeten</i>										554.817,0
01.PDH	Akreditasi Profesi dan SDM										554.817,0
01.PDH.311	SDM PBj dan Non-JF PBj										554.817,0
	051 - Penyusunan Instrumen										112.328,0
		Pusat	Pusat								112.328,0
	052 - Pendampingan Pembentukan JF PPBj										442.489,0
		Pusat	Pusat								442.489,0
02	<i>Meningkatnya kapabilitas UKPBj</i>										2.984.443,0
02.ABQ	Kebijakan Bidang Aparatur										230.062,0
02.ABQ.311	Rekomendasi Kebijakan Teknis SDM dan Kelembagaan PBj										230.062,0
	051 - Reviu dan Analisa Masalah dalam rangka Penyusunan Kebijakan										171.421,0
		Pusat	Pusat								171.421,0
	052 - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembinaan SDM dan Kelembagaan PBj										58.641,0
		Pusat	Pusat								58.641,0
02.PDE	Akreditasi Lembaga										2.754.381,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
02.PDE.311	UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3										2.754.381,0
	051 - Identifikasi Data dan Informasi										57.396,0
		Pusat	Pusat								57.396,0
	052 - Rapat Koordinasi UKPBJ										630.130,0
		Pusat	Pusat								630.130,0
	053 - Kolaborasi Antar UKPBJ										923.564,0
		Pusat	Pusat								923.564,0
	054 - Penetapan UKPBJ menuju Maturitas Level 3 - Proaktif										667.183,0
		Pusat	Pusat								667.183,0
	055 - Uji Coba Instrumen Penilaian dan Penetapan UKPBJ sebagai PKP-BJ										476.108,0
		Pusat	Pusat								476.108,0
Total											3.539.260,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten				554.817,0				0,0	0,0	0,0
01.PDH	Akreditasi Profesi dan SDM		Orang		554.817,0				0,0	0,0	0,0
01.PDH.311	SDM PBJ dan Non-JF PBJ	550	Orang		554.817,0	550	550	550	0,0	0,0	0,0
01.PDH.311.051	Penyusunan Instrumen	1,0	Dokumen	112.328,0	112.328,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.PDH.311.052	Pendampingan Pembentukan JF PPBJ	1,0	Laporan	442.489,0	442.489,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02	Meningkatnya kapabilitas UKPBJ				2.984.443,0				0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02.ABQ	Kebijakan Bidang Aparatur		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		230.062,0				0,0	0,0	0,0
02.ABQ.311	Rekomendasi Kebijakan Teknis SDM dan Kelembagaan PBJ	1	Rekomendasi Kebijakan		230.062,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
02.ABQ.311.051	Reviu dan Analisa Masalah dalam rangka Penyusunan Kebijakan	1,0	Laporan	171.421,0	171.421,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.ABQ.311.052	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembinaan SDM dan Kelembagaan PBJ	1,0	Rekomendasi Kebijakan	58.641,0	58.641,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.PDE	Akreditasi Lembaga		Lembaga/ Unit Kerja		2.754.381,0				0,0	0,0	0,0
02.PDE.311	UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3	28	Lembaga		2.754.381,0	28	28	28	0,0	0,0	0,0
02.PDE.311.051	Identifikasi Data dan Informasi	1,0	Kegiatan	57.396,0	57.396,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.PDE.311.052	Rapat Koordinasi UKPBJ	1,0	Kegiatan	630.130,0	630.130,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.PDE.311.053	Kolaborasi Antar UKPBJ	1,0	Laporan	923.564,0	923.564,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.PDE.311.054	Penetapan UKPBJ menuju Maturitas Level 3 - Proaktif	1,0	Laporan	667.183,0	667.183,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.PDE.311.055	Uji Coba Instrumen Penilaian dan Penetapan UKPBJ sebagai PKP-BJ	1,0	Laporan	476.108,0	476.108,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Total					3.539.260,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten		554.817,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	554.817,0
01.PDH	Akreditasi Profesi dan SDM		554.817,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	554.817,0
01.PDH.311	SDM PBJ dan Non-JF PBJ		554.817,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	554.817,0
01.PDH.311.051	Penyusunan Instrumen	Utama	112.328,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112.328,0
01.PDH.311.052	Pendampingan Pembentukan JF PPBJ	Utama	442.489,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	442.489,0
02	Meningkatnya kapabilitas UKPBJ		2.984.443,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.984.443,0
02.ABQ	Kebijakan Bidang Aparatur		230.062,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230.062,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.ABQ.311	Rekomendasi Kebijakan Teknis SDM dan Kelembagaan PBJ		230.062,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230.062,0
02.ABQ.311.051	Reviu dan Analisa Masalah dalam rangka Penyusunan Kebijakan	Utama	171.421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171.421,0
02.ABQ.311.052	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembinaan SDM dan Kelembagaan PBJ	Utama	58.641,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58.641,0
02.PDE	Akreditasi Lembaga		2.754.381,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.754.381,0
02.PDE.311	UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3		2.754.381,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.754.381,0
02.PDE.311.051	Identifikasi Data dan Informasi	Utama	57.396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57.396,0
02.PDE.311.052	Rapat Koordinasi UKPBJ	Utama	630.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	630.130,0
02.PDE.311.053	Kolaborasi Antar UKPBJ	Utama	923.564,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	923.564,0
02.PDE.311.054	Penetapan UKPBJ menuju Maturitas Level 3 - Proaktif	Utama	667.183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	667.183,0
02.PDE.311.055	Uji Coba Instrumen Penilaian dan Penetapan UKPBJ sebagai PKP-BJ	Utama	476.108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	476.108,0
Total			3.539.260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.539.260,0

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

2. PROGRAM : CJ - Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional

3. SASARAN PROGRAM : 05 - Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan PBJ

4. KEGIATAN : 6321 - Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 07 - Direktorat Sertifikasi Profesi

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten		8.031.628,0
01.01	Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda	10570	
01.02	Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi okupasi	1675	
01.03	Jumlah SDM PBJ Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kepala UKPBJ yang Kompeten	10	
01.04	Jumlah Peserta Pelatihan Fungsional dan Teknis Fungsional PBJ	950	
01.05	Jumlah Peserta Pelatihan Okupasi PBJ	6700	
01.06	Jumlah Peserta Pelatihan Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan/atau Kepala UKPBJ	1110	
01.07	Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi Tematik PBJ	9700	
01.08	Jumlah Peserta Pelatihan Anti korupsi PBJ	200	
01.09	Jumlah Peserta Pelatihan Teknis, Manajerial, dan Sosiokultural SDM PBJ	400	
01.10	Jumlah Peserta yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	4860	
01.11	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Okupasi	600	
01.12	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kompetensi Kepala UKPBJ	20	
01.13	Indeks Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi PBJ	70	
01.14	Persentase Layanan Penjaminan Mutu Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	98	
01.15	Persentase Tersedianya Perangkat Pembelajaran Pelatihan PBJ	100	
Total			8.031.628,0

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten</i>										3.708.029,0
01.ADD	Standarisasi Lembaga										197.158,0
01.ADD.331	Lembaga Pelaksana Uji Kompetensi PBJ yang Terstandar										197.158,0
	051 - Perumusan Strategi Standarisasi										750,0
		Pusat	Pusat								750,0
	052 - Standarisasi Pemenuhan Kriteria Pelaksana Uji Kompetensi PBJ										195.658,0
		Pusat	Pusat								195.658,0
	053 - Penyusunan Laporan dan Rekomendasi										750,0
		Pusat	Pusat								750,0
01.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM										492.000,0
01.ADG.331	Asesor yang Mendapatkan Pembinaan										492.000,0
	051 - Identifikasi Kebutuhan Peningkatan Kapasitas										12.000,0
		Pusat	Pusat								12.000,0
	052 - Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Asesor										477.075,0
		Pusat	Pusat								477.075,0
	053 - Evaluasi dan Pelaporan										2.925,0
		Pusat	Pusat								2.925,0
01.ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM										2.115.557,0
01.ADI.331	Peserta Sertifikasi SDM PBJ										2.115.557,0
	051 - Persiapan Pelaksanaan Sertifikasi										98.053,0
		Pusat	Pusat								98.053,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pelaksanaan dan Penetapan Hasil Sertifikasi										1.826.154,0
		Pusat	Pusat								1.826.154,0
	053 - Evaluasi Penyelenggaraan Sertifikasi										191.350,0
		Pusat	Pusat								191.350,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										599.282,0
01.AFA.331	Pedoman Sertifikasi PBJP										133.240,0
	051 - Identifikasi Kebutuhan Penyusunan Pedoman										4.620,0
		Pusat	Pusat								4.620,0
	052 - Penyusunan Pedoman										74.720,0
		Pusat	Pusat								74.720,0
	053 - Sosialisasi Pedoman										49.280,0
		Pusat	Pusat								49.280,0
	054 - Evaluasi Implementasi Pedoman										4.620,0
		Pusat	Pusat								4.620,0
01.AFA.332	Materi Uji Sertifikasi PBJP										466.042,0
	051 - Identifikasi Kebutuhan										1.920,0
		Pusat	Pusat								1.920,0
	052 - Penyusunan Materi Uji Sertifikasi										463.337,0
		Pusat	Pusat								463.337,0
	053 - Evaluasi										785,0
		Pusat	Pusat								785,0
01.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi										304.032,0
01.CCL.331	Sarana Sertifikasi PBJP										304.032,0
	051 - Identifikasi Kebutuhan										28.407,0
		Pusat	Pusat								28.407,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pemeliharaan Sarana dan SIM Sertifikasi										275.625,0
		Pusat	Pusat								275.625,0
Total											3.708.029,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten				3.708.029,0				0,0	0,0	0,0
01.ADD	Standarisasi Lembaga		Lembaga/ Unit Kerja		197.158,0				0,0	0,0	0,0
01.ADD.331	Lembaga Pelaksana Uji Kompetensi PBJ yang Terstandar	2	Lembaga		197.158,0	5	5	5	0,0	0,0	0,0
01.ADD.331.051	Perumusan Strategi Standarisasi	1,0	Kegiatan	750,0	750,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.ADD.331.052	Standarisasi Pemenuhan Kriteria Pelaksana Uji Kompetensi PBJ	20,0	Kegiatan	9.782,9	195.658,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
01.ADD.331.053	Penyusunan Laporan dan Rekomendasi	1,0	Laporan	750,0	750,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM		Orang		492.000,0				0,0	0,0	0,0
01.ADG.331	Asesor yang Mendapatkan Pembinaan	75	Orang		492.000,0	125	125	125	0,0	0,0	0,0
01.ADG.331.051	Identifikasi Kebutuhan Peningkatan Kapasitas	1,0	Kegiatan	12.000,0	12.000,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.ADG.331.052	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Asesor	3,0	Kegiatan	159.025,0	477.075,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
01.ADG.331.053	Evaluasi dan Pelaporan	1,0	Laporan	2.925,0	2.925,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM		Orang/ Sertifikat		2.115.557,0				0,0	0,0	0,0
01.ADI.331	Peserta Sertifikasi SDM PBJ	5480	Orang		2.115.557,0	5480	5480	5480	0,0	0,0	0,0
01.ADI.331.051	Persiapan Pelaksanaan Sertifikasi	256,0	Kegiatan	383,0	98.053,0	256,0	256,0	256,0	0,0	0,0	0,0
01.ADI.331.052	Pelaksanaan dan Penetapan Hasil Sertifikasi	256,0	Kegiatan	7.133,4	1.826.154,0	256,0	256,0	256,0	0,0	0,0	0,0
01.ADI.331.053	Evaluasi Penyelenggaraan Sertifikasi	256,0	Laporan	747,5	191.350,0	256,0	256,0	256,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		NSPK/ Rancangan Standar/ Pedoman/ Standar		599.282,0				0,0	0,0	0,0
01.AFA.331	Pedoman Sertifikasi PBJP	1	Pedoman		133.240,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.AFA.331.051	Identifikasi Kebutuhan Penyusunan Pedoman	1,0	Laporan	4.620,0	4.620,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.331.052	Penyusunan Pedoman	1,0	Pedoman	74.720,0	74.720,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.331.053	Sosialisasi Pedoman	1,0	Kegiatan	49.280,0	49.280,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.331.054	Evaluasi Implementasi Pedoman	1,0	Kegiatan	4.620,0	4.620,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.332	Materi Uji Sertifikasi PBJP	10	NSPK		466.042,0	25	25	25	0,0	0,0	0,0
01.AFA.332.051	Identifikasi Kebutuhan	1,0	Kegiatan	1.920,0	1.920,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.332.052	Penyusunan Materi Uji Sertifikasi	55,0	Kegiatan	8.424,3	463.337,0	55,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.332.053	Evaluasi	1,0	Kegiatan	785,0	785,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit		304.032,0				0,0	0,0	0,0
01.CCL.331	Sarana Sertifikasi PBJP	10	Unit		304.032,0	196	196	196	0,0	0,0	0,0
01.CCL.331.051	Identifikasi Kebutuhan	1,0	Laporan	28.407,0	28.407,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.CCL.331.052	Pemeliharaan Sarana dan SIM Sertifikasi	64,0	Kegiatan	4.306,6	275.625,0	64,0	64,0	64,0	0,0	0,0	0,0
Total					3.708.029,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten		3.708.029,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.708.029,0
01.ADD	Standarisasi Lembaga		197.158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197.158,0
01.ADD.331	Lembaga Pelaksana Uji Kompetensi PBJ yang Terstandar		197.158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197.158,0
01.ADD.331.051	Perumusan Strategi Standarisasi	Utama	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0
01.ADD.331.052	Standarisasi Pemenuhan Kriteria Pelaksana Uji Kompetensi PBJ	Utama	195.658,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195.658,0
01.ADD.331.053	Penyusunan Laporan dan Rekomendasi	Pendukung	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0
01.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM		492.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	492.000,0
01.ADG.331	Asesor yang Mendapatkan Pembinaan		492.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	492.000,0
01.ADG.331.051	Identifikasi Kebutuhan Peningkatan Kapasitas	Pendukung	12.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.000,0
01.ADG.331.052	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Asesor	Utama	477.075,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	477.075,0
01.ADG.331.053	Evaluasi dan Pelaporan	Pendukung	2.925,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.925,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM		2.115.557,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.115.557,0
01.ADI.331	Peserta Sertifikasi SDM PBJ		2.115.557,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.115.557,0
01.ADI.331.051	Persiapan Pelaksanaan Sertifikasi	Utama	98.053,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98.053,0
01.ADI.331.052	Pelaksanaan dan Penetapan Hasil Sertifikasi	Utama	1.826.154,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.826.154,0
01.ADI.331.053	Evaluasi Penyelenggaraan Sertifikasi	Utama	191.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191.350,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		599.282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	599.282,0
01.AFA.331	Pedoman Sertifikasi PBJP		133.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133.240,0
01.AFA.331.051	Identifikasi Kebutuhan Penyusunan Pedoman	Utama	4.620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.620,0
01.AFA.331.052	Penyusunan Pedoman	Utama	74.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74.720,0
01.AFA.331.053	Sosialisasi Pedoman	Utama	49.280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49.280,0
01.AFA.331.054	Evaluasi Implementasi Pedoman	Utama	4.620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.620,0
01.AFA.332	Materi Uji Sertifikasi PBJP		466.042,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	466.042,0
01.AFA.332.051	Identifikasi Kebutuhan	Utama	1.920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.920,0
01.AFA.332.052	Penyusunan Materi Uji Sertifikasi	Utama	463.337,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	463.337,0
01.AFA.332.053	Evaluasi	Utama	785,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	785,0
01.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		304.032,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304.032,0
01.CCL.331	Sarana Sertifikasi PBJP		304.032,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304.032,0
01.CCL.331.051	Identifikasi Kebutuhan	Utama	28.407,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28.407,0
01.CCL.331.052	Pemeliharaan Sarana dan SIM Sertifikasi	Utama	275.625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275.625,0
Total			3.708.029,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.708.029,0

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
2. PROGRAM : CJ - Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional
3. SASARAN PROGRAM : 03 - Meningkatnya kualitas kepatuhan pelaksanaan pengadaan
06 - Meningkatnya efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan
4. KEGIATAN : 6322 - Pengelolaan Advokasi dan Hukum
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 05 - Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
02	Terselenggaranya Konsolidasi, Probitiy Advice, dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa		1.289.020,0
02.01	Jumlah kegiatan konsolidasi pengadaan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga	1	
02.02	Jumlah kegiatan probity advice dan/atau advokasi yang dilakukan kepada Kementerian/Lembaga	2	
02.03	Jumlah kegiatan konsolidasi pengadaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah	20	
02.04	Jumlah kegiatan probity advice yang dilakukan di Pemerintah Daerah	4	
02.05	Jumlah Kegiatan Advokasi yang dilakukan di Pemerintah Daerah	75	
03	Terselenggaranya clearing house pengadaan yang efektif		2.351.294,0
03.01	Jumlah Kementerian/Lembaga yang mengimplementasikan/menyelenggarakan clearing house pengadaan	52	
03.02	Jumlah Pemerintah Daerah yang mengimplementasikan/menyelenggarakan clearing house pengadaan	110	
Total			3.640.314,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
02	<i>Terselenggaranya Konsolidasi, Probitiy Advice, dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa</i>										450.666,0
02.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan										450.666,0
02.FAI.413	Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Probitiy Advice, Konsolidasi Pengadaan dan/atau Advokasi										450.666,0
	051 - Peningkatan/Pemenuhan Kapasitas Layanan										87.700,0
		Pusat	Pusat								87.700,0
	052 - Analisis Permohonan Layanan dan Potensi Optimalisasi Pengadaan melalui Konsolidasi										255.305,0
		Pusat	Pusat								255.305,0
	053 - Pelaksanaan Pendampingan/Probitiy Advice										107.661,0
		Pusat	Pusat								107.661,0
03	<i>Terselenggaranya clearing house pengadaan yang efektif</i>										500.000,0
03.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan										500.000,0
03.FAI.414	Kementerian/Lembaga yang Mengimplementasikan/Menyelenggarakan Clearing House Pengadaan										500.000,0
	051 - Pembangunan Awareness Fungsi Clearing House										218.720,0
		Pusat	Pusat								218.720,0
	052 - Peningkatan Kapasitas Stakeholder dalam Penyelenggaraan Clearing House										127.320,0
		Pusat	Pusat								127.320,0
	053 - Monitoring dan Evaluasi Penerapan Clearing House										153.960,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								153.960,0
Total											950.666,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02	Terselenggaranya Konsolidasi, Probitry Advice, dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa				450.666,0				0,0	0,0	0,0
02.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		Lembaga/ KL/ Pemda/ Unit Kerja		450.666,0				0,0	0,0	0,0
02.FAI.413	Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Probitry Advice, Konsolidasi Pengadaan dan/atau Advokasi	3	Lembaga		450.666,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
02.FAI.413.051	Peningkatan/Pemenuhan Kapasitas Layanan	1,0	Laporan	87.700,0	87.700,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.FAI.413.052	Analisis Permohonan Layanan dan Potensi Optimalisasi Pengadaan melalui Konsolidasi	4,0	Laporan	63.826,3	255.305,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
02.FAI.413.053	Pelaksanaan Pendampingan/Probitry Advice	4,0	Laporan	26.915,3	107.661,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
03	Terselenggaranya clearing house pengadaan yang efektif				500.000,0				0,0	0,0	0,0
03.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		Lembaga/ KL/ Pemda/ Unit Kerja		500.000,0				0,0	0,0	0,0
03.FAI.414	Kementerian/Lembaga yang Mengimplementasikan/Menyelenggarakan Clearing House Pengadaan	2	Lembaga		500.000,0	6	6	6	0,0	0,0	0,0
03.FAI.414.051	Pembangunan Awareness Fungsi Clearing House	4,0	Laporan	54.680,0	218.720,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
03.FAI.414.052	Peningkatan Kapasitas Stakeholder dalam Penyelenggaraan Clearing House	4,0	Laporan	31.830,0	127.320,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
03.FAI.414.053	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Clearing House	2,0	Laporan	76.980,0	153.960,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Total					950.666,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02	Terselenggaranya Konsolidasi, Probitiy Advice, dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa		450.666,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450.666,0
02.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		450.666,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450.666,0
02.FAI.413	Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Probitiy Advice, Konsolidasi Pengadaan dan/atau Advokasi		450.666,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450.666,0
02.FAI.413.051	Peningkatan/Pemenuhan Kapasitas Layanan	Utama	87.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87.700,0
02.FAI.413.052	Analisis Permohonan Layanan dan Potensi Optimalisasi Pengadaan melalui Konsolidasi	Utama	255.305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255.305,0
02.FAI.413.053	Pelaksanaan Pendampingan/Probitiy Advice	Utama	107.661,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107.661,0
03	Terselenggaranya clearing house pengadaan yang efektif		500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
03.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
03.FAI.414	Kementerian/Lembaga yang Mengimplementasikan/Menyelenggarakan Clearing House Pengadaan		500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
03.FAI.414.051	Pembangunan Awareness Fungsi Clearing House	Utama	218.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218.720,0
03.FAI.414.052	Peningkatan Kapasitas Stakeholder dalam Penyelenggaraan Clearing House	Utama	127.320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127.320,0
03.FAI.414.053	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Clearing House	Utama	153.960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153.960,0
Total			950.666,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950.666,0

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
2. PROGRAM : CJ - Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional
3. SASARAN PROGRAM : 02 - Meningkatnya dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional
4. KEGIATAN : 6323 - Pengelolaan dan Pembinaan Stakeholder PBJ
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 05 - Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
02	Meningkatnya partisipasi dan kompetisi UMKK		3.881.081,0
02.01	Jumlah penyedia UMKK yang on-boarding dalam sistem pengadaan digital	50	
02.02	Jumlah Partisipasi UMKK yang terlibat dalam PBJ	824.863	
Total			3.881.081,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
02	<i>Meningkatnya partisipasi dan kompetisi UMKK</i>										993.900,0
02.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan										993.900,0
02.FAI.411	Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ										993.900,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Persiapan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ										372.700,0
		Pusat	Pusat								372.700,0
	052 - Pelaksanaan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ										308.922,0
		Pusat	Pusat								308.922,0
	053 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ										312.278,0
		Pusat	Pusat								312.278,0
Total											993.900,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02	Meningkatnya partisipasi dan kompetisi UMKK				993.900,0				0,0	0,0	0,0
02.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		Lembaga/ KL/ Pemda/ Unit Kerja		993.900,0				0,0	0,0	0,0
02.FAI.411	Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ	6	K/L		993.900,0	73	78	83	0,0	0,0	0,0
02.FAI.411.051	Persiapan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ	4,0	Laporan	93.175,0	372.700,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
02.FAI.411.052	Pelaksanaan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ	4,0	Laporan	77.230,5	308.922,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02.FAI.411.053	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ	4,0	Laporan	78.069,5	312.278,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Total					993.900,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02	Meningkatnya partisipasi dan kompetisi UMKK		993.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	993.900,0
02.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		993.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	993.900,0
02.FAI.411	Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ		993.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	993.900,0
02.FAI.411.051	Persiapan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ	Utama	372.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	372.700,0
02.FAI.411.052	Pelaksanaan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ	Utama	308.922,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308.922,0
02.FAI.411.053	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ	Utama	312.278,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312.278,0
Total			993.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	993.900,0

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
2. PROGRAM : CJ - Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional
3. SASARAN PROGRAM : 03 - Meningkatnya kualitas kepatuhan pelaksanaan pengadaan
06 - Meningkatnya efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan
4. KEGIATAN : 6322 - Pengelolaan Advokasi dan Hukum
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 15 - Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
02	Terselenggaranya Konsolidasi, Probitiy Advice, dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa		1.289.020,0
02.01	Jumlah kegiatan konsolidasi pengadaan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga	1	
02.02	Jumlah kegiatan probity advice dan/atau advokasi yang dilakukan kepada Kementerian/Lembaga	2	
02.03	Jumlah kegiatan konsolidasi pengadaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah	20	
02.04	Jumlah kegiatan probity advice yang dilakukan di Pemerintah Daerah	4	
02.05	Jumlah Kegiatan Advokasi yang dilakukan di Pemerintah Daerah	75	
03	Terselenggaranya clearing house pengadaan yang efektif		2.351.294,0
03.01	Jumlah Kementerian/Lembaga yang mengimplementasikan/menyelenggarakan clearing house pengadaan	52	
03.02	Jumlah Pemerintah Daerah yang mengimplementasikan/menyelenggarakan clearing house pengadaan	110	
Total			3.640.314,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
02	<i>Terselenggaranya Konsolidasi, Probitry Advice, dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa</i>										838.354,0
02.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan										838.354,0
02.FAI.423	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Probitry Advice, Konsolidasi Pengadaan dan/atau Advokasi										838.354,0
	051 - Peningkatan/Pemenuhan Kapasitas Layanan										178.584,0
		Pusat	Pusat								178.584,0
	052 - Analisis Permohonan Layanan dan Potensi Optimalisasi Pengadaan										95.160,0
		Pusat	Pusat								95.160,0
	053 - Pelaksanaan Pendampingan										564.610,0
		Pusat	Pusat								564.610,0
03	<i>Terselenggaranya clearing house pengadaan yang efektif</i>										859.954,0
03.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan										859.954,0
03.FAI.424	Pemerintah Daerah yang Mengimplementasikan/Menyelenggarakan Clearing House pengadaan										859.954,0
	051 - Persiapan peningkatan kapabilitas stakeholder untuk melaksanakan Clearing House										211.550,0
		Pusat	Pusat								211.550,0
	052 - Peningkatan kapabilitas stakeholder untuk melaksanakan Clearing House										539.056,0
		Pusat	Pusat								539.056,0
	053 - Monitoring dan Evaluasi peningkatan kapabilitas stakeholder untuk melaksanakan Clearing House										109.348,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								109.348,0
Total											1.698.308,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02	Terselenggaranya Konsolidasi, Probitry Advice, dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa				838.354,0				0,0	0,0	0,0
02.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		Lembaga/ KL/ Pemda/ Unit Kerja		838.354,0				0,0	0,0	0,0
02.FAI.423	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Probitry Advice, Konsolidasi Pengadaan dan/atau Advokasi	75	Pemda		838.354,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
02.FAI.423.051	Peningkatan/Pemenuhan Kapasitas Layanan	12,0	Kegiatan	14.882,0	178.584,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0
02.FAI.423.052	Analisis Permohonan Layanan dan Potensi Optimalisasi Pengadaan	12,0	Kegiatan	7.930,0	95.160,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0
02.FAI.423.053	Pelaksanaan Pendampingan	40,0	Kegiatan	14.115,3	564.610,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
03	Terselenggaranya clearing house pengadaan yang efektif				859.954,0				0,0	0,0	0,0
03.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		Lembaga/ KL/ Pemda/ Unit Kerja		859.954,0				0,0	0,0	0,0
03.FAI.424	Pemerintah Daerah yang Mengimplementasikan/Menyelenggarakan Clearing House pengadaan	10	Lembaga		859.954,0	20	25	25	0,0	0,0	0,0
03.FAI.424.051	Persiapan peningkatan kapabilitas stakeholder untuk melaksanakan Clearing House	10,0	Kegiatan	21.155,0	211.550,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
03.FAI.424.052	Peningkatan kapabilitas stakeholder untuk melaksanakan Clearing House	20,0	Kegiatan	26.952,8	539.056,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
03.FAI.424.053	Monitoring dan Evaluasi peningkatan kapabilitas stakeholder untuk melaksanakan Clearing House	10,0	Kegiatan	10.934,8	109.348,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Total					1.698.308,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02	Terselenggaranya Konsolidasi, Probitry Advice, dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa		838.354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	838.354,0
02.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		838.354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	838.354,0
02.FAI.423	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Probitry Advice, Konsolidasi Pengadaan dan/atau Advokasi		838.354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	838.354,0
02.FAI.423.051	Peningkatan/Pemenuhan Kapasitas Layanan	Utama	178.584,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178.584,0
02.FAI.423.052	Analisis Permohonan Layanan dan Potensi Optimalisasi Pengadaan	Utama	95.160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95.160,0
02.FAI.423.053	Pelaksanaan Pendampingan	Utama	564.610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	564.610,0
03	Terselenggaranya clearing house pengadaan yang efektif		859.954,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	859.954,0
03.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		859.954,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	859.954,0
03.FAI.424	Pemerintah Daerah yang Mengimplementasikan/Menyelenggarakan Clearing House pengadaan		859.954,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	859.954,0
03.FAI.424.051	Persiapan peningkatan kapabilitas stakeholder untuk melaksanakan Clearing House	Utama	211.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211.550,0
03.FAI.424.052	Peningkatan kapabilitas stakeholder untuk melaksanakan Clearing House	Utama	539.056,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	539.056,0
03.FAI.424.053	Monitoring dan Evaluasi peningkatan kapabilitas stakeholder untuk melaksanakan Clearing House	Utama	109.348,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109.348,0
Total			1.698.308,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.698.308,0

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
2. PROGRAM : CJ - Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional
3. SASARAN PROGRAM : 02 - Meningkatnya dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional
4. KEGIATAN : 6323 - Pengelolaan dan Pembinaan Stakeholder PBJ
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 15 - Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
02	Meningkatnya partisipasi dan kompetisi UMKK		3.881.081,0
02.01	Jumlah penyedia UMKK yang on-boarding dalam sistem pengadaan digital	50	
02.02	Jumlah Partisipasi UMKK yang terlibat dalam PBJ	824.863	
Total			3.881.081,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
02	<i>Meningkatnya partisipasi dan kompetisi UMKK</i>										1.362.455,0
02.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan										1.362.455,0
02.FAI.421	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ										1.362.455,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Persiapan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ										191.006,0
		Pusat	Pusat								191.006,0
	052 - Pelaksanaan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ										1.070.975,0
		Pusat	Pusat								1.070.975,0
	053 - Monitoring dan Evaluasi Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ										100.474,0
		Pusat	Pusat								100.474,0
Total											1.362.455,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02	Meningkatnya partisipasi dan kompetisi UMKK				1.362.455,0				0,0	0,0	0,0
02.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		Lembaga/ KL/ Pemda/ Unit Kerja		1.362.455,0				0,0	0,0	0,0
02.FAI.421	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ	48	Pemda		1.362.455,0	125	150	175	0,0	0,0	0,0
02.FAI.421.051	Persiapan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ	10,0	Kegiatan	19.100,6	191.006,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
02.FAI.421.052	Pelaksanaan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ	20,0	Kegiatan	53.548,8	1.070.975,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02.FAI.421.053	Monitoring dan Evaluasi Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBj	10,0	Kegiatan	10.047,4	100.474,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0
Total					1.362.455,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02	Meningkatnya partisipasi dan kompetisi UMKK		1.362.455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.362.455,0
02.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		1.362.455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.362.455,0
02.FAI.421	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ		1.362.455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.362.455,0
02.FAI.421.051	Persiapan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ	Utama	191.006,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191.006,0
02.FAI.421.052	Pelaksanaan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ	Utama	1.070.975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.070.975,0
02.FAI.421.053	Monitoring dan Evaluasi Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ	Utama	100.474,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.474,0
Total			1.362.455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.362.455,0

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
2. PROGRAM : CJ - Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional
3. SASARAN PROGRAM : 03 - Meningkatnya kualitas kepatuhan pelaksanaan pengadaan
06 - Meningkatnya efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan
4. KEGIATAN : 6322 - Pengelolaan Advokasi dan Hukum
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 13 - Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Meningkatnya Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan		269.782,0
01.01	Jumlah K/L/Pemda yang terbangun kapabilitas pencegahan korupsi pengadaan	2	
03	Terselenggaranya clearing house pengadaan yang efektif		2.351.294,0
03.01	Jumlah Kementerian/Lembaga yang mengimplementasikan/menyelenggarakan clearing house pengadaan	52	
03.02	Jumlah Pemerintah Daerah yang mengimplementasikan/menyelenggarakan clearing house pengadaan	110	
04	Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan PBJ		723.099,0
04.01	Persentase layanan PKA yang Optimal	30	
04.02	Persentase layanan LPS yang Optimal	30	
04.03	Persentase layanan penanganan pengaduan yang optimal	30	
04.04	Jumlah instansi/stakeholder yang mendapatkan pembinaan dalam dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan PBJ	4	
Total			3.344.175,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Meningkatnya Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan</i>										269.782,0
01.UAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan										269.782,0
01.UAI.431	K/L/Pemda yang Terbangun Kapabilitas untuk Pencegahan Korupsi Pengadaan										269.782,0
	051 - Pemetaan Kapasitas Stakeholder Dalam Pembangunan Kapabilitas Pencegahan Permasalahan Kontrak dan Dukungan Penegakan Hukum										1.944,0
		Pusat	Pusat								1.944,0
	052 - Pembangunan Kapabilitas Instansi/Stakeholder										253.342,0
		Pusat	Pusat								253.342,0
	053 - Evaluasi Pembangunan Kapabilitas Instansi/Stakeholder										14.496,0
		Pusat	Pusat								14.496,0
03	<i>Terselenggaranya clearing house pengadaan yang efektif</i>										991.340,0
03.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM										991.340,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
03.ADG.431	Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibentuk										486.503,0
	051 - Penyusunan Kriteria dan Instrumen Rekrutmen										9.720,0
		Pusat	Pusat								9.720,0
	052 - Penyelenggaraan Rekrutmen										391.924,0
		Pusat	Pusat								391.924,0
	053 - Penetapan Hasil Rekrutmen dan Pembentukan Personil										84.859,0
		Pusat	Pusat								84.859,0
03.ADG.432	Personil Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP yang Dibentuk										504.837,0
	051 - Penyusunan Instrumen Rekrutmen										9.720,0
		Pusat	Pusat								9.720,0
	052 - Pelaksanaan Rekrutmen										395.282,0
		Pusat	Pusat								395.282,0
	053 - Penetapan Hasil Rekrutmen										99.835,0
		Pusat	Pusat								99.835,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
04	<i>Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan PBJ</i>										723.099,0
04.BCE	Penanganan Perkara										511.107,0
04.BCE.431	Perkara/Permasalahan PBJ yang Terlayani										511.107,0
	051 - Analisis Pelaksanaan Layanan Permasalahan Kontrak PBJ										9.720,0
		Pusat	Pusat								9.720,0
	052 - Penanganan Pelaksanaan Layanan Permasalahan Kontrak PBJ										491.667,0
		Pusat	Pusat								491.667,0
	053 - Pelaksanaan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP dan Bimbingan Teknis Personil LPS										9.720,0
		Pusat	Pusat								9.720,0
04.BCE.432	Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJ yang Berkualitas										0,0
	051 - Persiapan Pelaksanaan Layanan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pelaksanaan Layanan Penyelesaian Sengketa										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	053 - Peningkatan Kapasitas Personil Layanan Penyelesaian Sengketa										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	054 - Evaluasi Layanan Penyelesaian Sengketa										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
04.BCE.433	Layanan Pemberian Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Optimal										0,0
	051 - Persiapan Pelaksanaan Layanan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Pelaksanaan Layanan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah										0,0
		Pusat	Pusat								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Peningkatan Kapasitas Personil Layanan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	054 - Evaluasi Layanan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
04.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan										211.992,0
04.FAI.431	Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan PBJ										211.992,0
	051 - Pemetaan Kapasitas Stakeholder Dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Kontrak										1.944,0
		Pusat	Pusat								1.944,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Peningkatan Kapasitas Stakeholder Dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Kontrak										171.640,0
		Pusat	Pusat								171.640,0
	053 - Peningkatan Kapasitas Layanan Permasalahan Kontrak PBJ										34.464,0
		Pusat	Pusat								34.464,0
	054 - Evaluasi Kapasitas Stakeholder Dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Kontrak										3.944,0
		Pusat	Pusat								3.944,0
Total											1.984.221,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Meningkatnya Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan				269.782,0				0,0	0,0	0,0
01.UAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		Lembaga/ KL/ Pemda/ Unit Kerja		269.782,0				0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.UAI.431	K/L/Pemda yang Terbangun Kapabilitas untuk Pencegahan Korupsi Pengadaan	2	Lembaga		269.782,0	30	30	30	0,0	0,0	0,0
01.UAI.431.051	Pemetaan Kapasitas Stakeholder Dalam Pembangunan Kapabilitas Pencegahan Permasalahan Kontrak dan Dukungan Penegakan Hukum	1,0	Laporan	1.944,0	1.944,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.UAI.431.052	Pembangunan Kapabilitas Instansi/Stakeholder	10,0	Kegiatan	25.334,2	253.342,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
01.UAI.431.053	Evaluasi Pembangunan Kapabilitas Instansi/Stakeholder	1,0	Laporan	14.496,0	14.496,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03	Terselenggaranya clearing house pengadaan yang efektif				991.340,0				0,0	0,0	0,0
03.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM		Orang		991.340,0				0,0	0,0	0,0
03.ADG.431	Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibentuk	2	Orang		486.503,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
03.ADG.431.051	Penyusunan Kriteria dan Instrumen Rekrutmen	1,0	Laporan	9.720,0	9.720,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03.ADG.431.052	Penyelenggaraan Rekrutmen	1,0	Kegiatan	391.924,0	391.924,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03.ADG.431.053	Penetapan Hasil Rekrutmen dan Pembentukan Personil	1,0	Laporan	84.859,0	84.859,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03.ADG.432	Personil Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP yang Dibentuk	10	Orang		504.837,0	10	10	10	0,0	0,0	0,0
03.ADG.432.051	Penyusunan Instrumen Rekrutmen	1,0	Laporan	9.720,0	9.720,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03.ADG.432.052	Pelaksanaan Rekrutmen	1,0	Kegiatan	395.282,0	395.282,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03.ADG.432.053	Penetapan Hasil Rekrutmen	1,0	Laporan	99.835,0	99.835,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
04	Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan PBJ				723.099,0				0,0	0,0	0,0
04.BCE	Penanganan Perkara		Perkara/ Berkas Perkara		511.107,0				0,0	0,0	0,0
04.BCE.431	Perkara/Permasalahan PBJ yang Terlayani	250	Perkara		511.107,0	550	600	650	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
04.BCE.431.051	Analisis Pelaksanaan Layanan Permasalahan Kontrak PBJ	1,0	Laporan	9.720,0	9.720,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
04.BCE.431.052	Penanganan Pelaksanaan Layanan Permasalahan Kontrak PBJ	575,0	Perkara	855,1	491.667,0	575,0	575,0	575,0	0,0	0,0	0,0
04.BCE.431.053	Pelaksanaan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP dan Bimbingan Teknis Personil LPS	25,0	Perkara	388,8	9.720,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
04.BCE.432	Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJ yang Berkualitas	10	Perkara		0,0	25	30	30	0,0	0,0	0,0
04.BCE.432.051	Persiapan Pelaksanaan Layanan	1,0	Kegiatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.BCE.432.052	Pelaksanaan Layanan Penyelesaian Sengketa	25,0	Sengketa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.BCE.432.053	Peningkatan Kapasitas Personil Layanan Penyelesaian Sengketa	1,0	Kegiatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.BCE.432.054	Evaluasi Layanan Penyelesaian Sengketa	1,0	Laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.BCE.433	Layanan Pemberian Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Optimal	200	Perkara		0,0	430	460	490	0,0	0,0	0,0
04.BCE.433.051	Persiapan Pelaksanaan Layanan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1,0	Kegiatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.BCE.433.052	Pelaksanaan Layanan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1,0	Kegiatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.BCE.433.053	Peningkatan Kapasitas Personil Layanan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1,0	Kegiatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.BCE.433.054	Evaluasi Layanan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1,0	Laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		Lembaga/ KL/ Pemda/ Unit Kerja		211.992,0				0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
04.FAI.431	Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan PBJ	4	Lembaga		211.992,0	20	30	40	0,0	0,0	0,0
04.FAI.431.051	Pemetaan Kapasitas Stakeholder Dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Kontrak	1,0	Laporan	1.944,0	1.944,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
04.FAI.431.052	Peningkatan Kapasitas Stakeholder Dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Kontrak	4,0	Instansi	42.910,0	171.640,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
04.FAI.431.053	Peningkatan Kapasitas Layanan Permasalahan Kontrak PBJ	1,0	Kegiatan	34.464,0	34.464,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
04.FAI.431.054	Evaluasi Kapasitas Stakeholder Dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Kontrak	1,0	Laporan	3.944,0	3.944,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Total					1.984.221,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Meningkatnya Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan		269.782,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269.782,0
01.UAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		269.782,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269.782,0
01.UAI.431	K/L/Pemda yang Terbangun Kapabilitas untuk Pencegahan Korupsi Pengadaan		269.782,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269.782,0
01.UAI.431.051	Pemetaan Kapasitas Stakeholder Dalam Pembangunan Kapabilitas Pencegahan Permasalahan Kontrak dan Dukungan Penegakan Hukum	Utama	1.944,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.944,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.UAI.431.052	Pembangunan Kapabilitas Instansi/Stakeholder	Utama	253.342,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253.342,0
01.UAI.431.053	Evaluasi Pembangunan Kapabilitas Instansi/Stakeholder	Utama	14.496,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.496,0
03	Terselenggaranya clearing house pengadaan yang efektif		991.340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	991.340,0
03.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM		991.340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	991.340,0
03.ADG.431	Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibentuk		486.503,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486.503,0
03.ADG.431.051	Penyusunan Kriteria dan Instrumen Rekrutmen	Pendukung	9.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.720,0
03.ADG.431.052	Penyelenggaraan Rekrutmen	Utama	391.924,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	391.924,0
03.ADG.431.053	Penetapan Hasil Rekrutmen dan Pembentukan Personil	Pendukung	84.859,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84.859,0
03.ADG.432	Personil Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP yang Dibentuk		504.837,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	504.837,0
03.ADG.432.051	Penyusunan Instrumen Rekrutmen	Utama	9.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.720,0
03.ADG.432.052	Pelaksanaan Rekrutmen	Utama	395.282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	395.282,0
03.ADG.432.053	Penetapan Hasil Rekrutmen	Utama	99.835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99.835,0
04	Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan PBJ		723.099,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	723.099,0
04.BCE	Penanganan Perkara		511.107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	511.107,0
04.BCE.431	Perkara/Permasalahan PBJ yang Terlayani		511.107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	511.107,0
04.BCE.431.051	Analisis Pelaksanaan Layanan Permasalahan Kontrak PBJ	Pendukung	9.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.720,0
04.BCE.431.052	Penanganan Pelaksanaan Layanan Permasalahan Kontrak PBJ	Utama	491.667,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	491.667,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
04.BCE.431.053	Pelaksanaan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP dan Bimbingan Teknis Personil LPS	Utama	9.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.720,0
04.BCE.432	Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJ yang Berkualitas		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.BCE.432.051	Persiapan Pelaksanaan Layanan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.BCE.432.052	Pelaksanaan Layanan Penyelesaian Sengketa	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.BCE.432.053	Peningkatan Kapasitas Personil Layanan Penyelesaian Sengketa	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.BCE.432.054	Evaluasi Layanan Penyelesaian Sengketa	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.BCE.433	Layanan Pemberian Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Optimal		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.BCE.433.051	Persiapan Pelaksanaan Layanan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.BCE.433.052	Pelaksanaan Layanan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.BCE.433.053	Peningkatan Kapasitas Personil Layanan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.BCE.433.054	Evaluasi Layanan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		211.992,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211.992,0
04.FAI.431	Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan PBJ		211.992,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211.992,0
04.FAI.431.051	Pemetaan Kapasitas Stakeholder Dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Kontrak	Pendukung	1.944,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.944,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
04.FAI.431.052	Peningkatan Kapasitas Stakeholder Dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Kontrak	Utama	171.640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171.640,0
04.FAI.431.053	Peningkatan Kapasitas Layanan Permasalahan Kontrak PBJ	Utama	34.464,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34.464,0
04.FAI.431.054	Evaluasi Kapasitas Stakeholder Dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Kontrak	Pendukung	3.944,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.944,0
Total			1.984.221,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.984.221,0

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

- 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA** : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
- 2. PROGRAM** : CJ - Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional
- 3. SASARAN PROGRAM** : 05 - Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan PBJ
- 4. KEGIATAN** : 6321 - Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya
- 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)** : 18 - Pusat Pelatihan Sumber DayaManusia Pengadaan Barang/Jasa

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten		8.031.628,0
01.01	Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda	10570	
01.02	Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi okupasi	1675	
01.03	Jumlah SDM PBJ Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kepala UKPBJ yang Kompeten	10	
01.04	Jumlah Peserta Pelatihan Fungsional dan Teknis Fungsional PBJ	950	
01.05	Jumlah Peserta Pelatihan Okupasi PBJ	6700	
01.06	Jumlah Peserta Pelatihan Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan/atau Kepala UKPBJ	1110	
01.07	Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi Tematik PBJ	9700	
01.08	Jumlah Peserta Pelatihan Anti korupsi PBJ	200	
01.09	Jumlah Peserta Pelatihan Teknis, Manajerial, dan Sosiokultural SDM PBJ	400	
01.10	Jumlah Peserta yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	4860	
01.11	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Okupasi	600	
01.12	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kompetensi Kepala UKPBJ	20	
01.13	Indeks Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi PBJ	70	
01.14	Persentase Layanan Penjaminan Mutu Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	98	
01.15	Persentase Tersedianya Perangkat Pembelajaran Pelatihan PBJ	100	
Total			8.031.628,0

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Terwujudnya SDM PBj yang kompeten</i>										3.768.782,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										644.698,0
01.AFA.511	Program dan Kurikulum Pelatihan PBj										450.000,0
	051 - Penyusunan Rancangan Program dan Kurikulum										175.690,0
		Pusat	Pusat								175.690,0
	052 - Pembahasan Rancangan Program dan Kurikulum										267.020,0
		Pusat	Pusat								267.020,0
	053 - Finalisasi Program dan Kurikulum										7.290,0
		Pusat	Pusat								7.290,0
01.AFA.512	Pedoman Pelatihan PBj										194.698,0
	051 - Pengumpulan Data dan Informasi										30.166,0
		Pusat	Pusat								30.166,0
	052 - Analisis Data dan Informasi										77.087,0
		Pusat	Pusat								77.087,0
	053 - Penyusunan Pedoman										87.445,0
		Pusat	Pusat								87.445,0
01.CAA	Sarana Bidang Pendidikan										586.476,0
01.CAA.511	Media Pembelajaran Berbasis TIK										586.476,0
	051 - Analisis dan Desain Media Pembelajaran Berbasis TIK										9.180,0
		Pusat	Pusat								9.180,0
	052 - Pengembangan dan Implementasi Media Pembelajaran Berbasis TIK										577.296,0
		Pusat	Pusat								577.296,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.DCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan										1.603.566,0
01.DCF.511	Peserta Pelatihan PBJ										1.303.566,0
	051 - Persiapan Pelaksanaan Pelatihan										98.546,0
		Pusat	Pusat								98.546,0
	052 - Pelaksanaan Pelatihan										1.201.780,0
		Pusat	Pusat								1.201.780,0
	053 - Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan										3.240,0
		Pusat	Pusat								3.240,0
01.DCF.512	Sumber Daya Manusia yang mendapatkan Pelatihan Perancang Kebijakan PBJ										300.000,0
	051 - Persiapan Pelatihan Perancang Kebijakan PBJ										16.695,0
		Pusat	Pusat								16.695,0
	052 - Pelaksanaan Pelatihan Perancang Kebijakan PBJ										280.065,0
		Pusat	Pusat								280.065,0
	053 - Evaluasi Pelatihan Perancang Kebijakan PBJ										3.240,0
		Pusat	Pusat								3.240,0
01.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan										484.042,0
01.FAE.511	Laporan Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan PBJ										484.042,0
	051 - Identifikasi Data dan Informasi										3.240,0
		Pusat	Pusat								3.240,0
	052 - Pelayanan Penjaminan Mutu										467.432,0
		Pusat	Pusat								467.432,0
	053 - Penyusunan Laporan										13.370,0
		Pusat	Pusat								13.370,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.SCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan										450.000,0
01.SCF.511	Peserta pelatihan anti korupsi PBJ										450.000,0
	051 - Persiapan Pelatihan Antikorupsi PBJ										42.412,0
		Pusat	Pusat								42.412,0
	052 - Pelaksanaan Pelatihan Anti Korupsi PBJ										370.130,0
		Pusat	Pusat								370.130,0
	053 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rencana Aksi										37.458,0
		Pusat	Pusat								37.458,0
Total											3.768.782,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten				3.768.782,0				0,0	0,0	0,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		NSPK/ Rancangan Standar/ Pedoman/ Standar		644.698,0				0,0	0,0	0,0
01.AFA.511	Program dan Kurikulum Pelatihan PBJ	3	NSPK		450.000,0	5	6	6	0,0	0,0	0,0
01.AFA.511.051	Penyusunan Rancangan Program dan Kurikulum	5,0	Laporan	35.138,0	175.690,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.511.052	Pembahasan Rancangan Program dan Kurikulum	5,0	Laporan	53.404,0	267.020,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.511.053	Finalisasi Program dan Kurikulum	5,0	Program dan Kurikulum	1.458,0	7.290,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.512	Pedoman Pelatihan PBJ	4	Pedoman		194.698,0	5	6	6	0,0	0,0	0,0
01.AFA.512.051	Pengumpulan Data dan Informasi	1,0	Kegiatan	30.166,0	30.166,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.512.052	Analisis Data dan Informasi	1,0	Kegiatan	77.087,0	77.087,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.512.053	Penyusunan Pedoman	4,0	Pedoman	21.861,3	87.445,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.CAA	Sarana Bidang Pendidikan		Paket/ Unit/ m2		586.476,0				0,0	0,0	0,0
01.CAA.511	Media Pembelajaran Berbasis TIK	3	Paket		586.476,0	5	6	6	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.CAA.511.051	Analisis dan Desain Media Pembelajaran Berbasis TIK	1,0	Laporan	9.180,0	9.180,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.CAA.511.052	Pengembangan dan Implementasi Media Pembelajaran Berbasis TIK	5,0	Paket	115.459,2	577.296,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
01.DCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan		Orang/ Kegiatan		1.603.566,0				0,0	0,0	0,0
01.DCF.511	Peserta Pelatihan PBJ	12000	Orang		1.303.566,0	16500	16800	17000	0,0	0,0	0,0
01.DCF.511.051	Persiapan Pelaksanaan Pelatihan	1,0	Kegiatan	98.546,0	98.546,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.DCF.511.052	Pelaksanaan Pelatihan	16.000,0	Orang	75,1	1.201.780,0	16.000,0	16.000,0	16.000,0	0,0	0,0	0,0
01.DCF.511.053	Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan	1,0	Laporan	3.240,0	3.240,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.DCF.512	Sumber Daya Manusia yang mendapatkan Pelatihan Perancang Kebijakan PBJ	400	Orang		300.000,0	360	360	360	0,0	0,0	0,0
01.DCF.512.051	Persiapan Pelatihan Perancang Kebijakan PBJ	2,0	Kegiatan	8.347,5	16.695,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
01.DCF.512.052	Pelaksanaan Pelatihan Perancang Kebijakan PBJ	80,0	Orang	3.500,8	280.065,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
01.DCF.512.053	Evaluasi Pelatihan Perancang Kebijakan PBJ	1,0	Laporan	3.240,0	3.240,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		Laporan/ Rekomendasi		484.042,0				0,0	0,0	0,0
01.FAE.511	Laporan Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan PBJ	5	Laporan		484.042,0	5	5	5	0,0	0,0	0,0
01.FAE.511.051	Identifikasi Data dan Informasi	1,0	Kegiatan	3.240,0	3.240,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.FAE.511.052	Pelayanan Penjaminan Mutu	2,0	Kegiatan	233.716,0	467.432,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
01.FAE.511.053	Penyusunan Laporan	5,0	Laporan	2.674,0	13.370,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
01.SCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan		Orang/ Kegiatan		450.000,0				0,0	0,0	0,0
01.SCF.511	Peserta pelatihan anti korupsi PBJ	200	Orang		450.000,0	400	400	400	0,0	0,0	0,0
01.SCF.511.051	Persiapan Pelatihan Antikorupsi PBJ	1,0	Kegiatan	42.412,0	42.412,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.SCF.511.052	Pelaksanaan Pelatihan Anti Korupsi PBJ	200,0	Orang	1.850,7	370.130,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
01.SCF.511.053	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rencana Aksi	1,0	Laporan	37.458,0	37.458,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Total					3.768.782,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Terwujudnya SDM PBj yang kompeten		3.768.782,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.768.782,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		644.698,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	644.698,0
01.AFA.511	Program dan Kurikulum Pelatihan PBj		450.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450.000,0
01.AFA.511.051	Penyusunan Rancangan Program dan Kurikulum	Utama	175.690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175.690,0
01.AFA.511.052	Pembahasan Rancangan Program dan Kurikulum	Utama	267.020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267.020,0
01.AFA.511.053	Finalisasi Program dan Kurikulum	Utama	7.290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.290,0
01.AFA.512	Pedoman Pelatihan PBj		194.698,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194.698,0
01.AFA.512.051	Pengumpulan Data dan Informasi	Utama	30.166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.166,0
01.AFA.512.052	Analisis Data dan Informasi	Utama	77.087,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77.087,0
01.AFA.512.053	Penyusunan Pedoman	Utama	87.445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87.445,0
01.CAA	Sarana Bidang Pendidikan		586.476,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	586.476,0
01.CAA.511	Media Pembelajaran Berbasis TIK		586.476,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	586.476,0
01.CAA.511.051	Analisis dan Desain Media Pembelajaran Berbasis TIK	Utama	9.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.180,0
01.CAA.511.052	Pengembangan dan Implementasi Media Pembelajaran Berbasis TIK	Utama	577.296,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	577.296,0
01.DCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan		1.603.566,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.603.566,0
01.DCF.511	Peserta Pelatihan PBj		1.303.566,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.303.566,0
01.DCF.511.051	Persiapan Pelaksanaan Pelatihan	Utama	98.546,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98.546,0
01.DCF.511.052	Pelaksanaan Pelatihan	Utama	1.201.780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.201.780,0
01.DCF.511.053	Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan	Utama	3.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.240,0
01.DCF.512	Sumber Daya Manusia yang mendapatkan Pelatihan Perancang Kebijakan PBj		300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
01.DCF.512.051	Persiapan Pelatihan Perancang Kebijakan PBj	Utama	16.695,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.695,0
01.DCF.512.052	Pelaksanaan Pelatihan Perancang Kebijakan PBj	Utama	280.065,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280.065,0
01.DCF.512.053	Evaluasi Pelatihan Perancang Kebijakan PBj	Utama	3.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.240,0
01.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		484.042,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	484.042,0
01.FAE.511	Laporan Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan PBj		484.042,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	484.042,0
01.FAE.511.051	Identifikasi Data dan Informasi	Utama	3.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.240,0
01.FAE.511.052	Pelayanan Penjaminan Mutu	Utama	467.432,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467.432,0
01.FAE.511.053	Penyusunan Laporan	Utama	13.370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.370,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.SCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan		450.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450.000,0
01.SCF.511	Peserta pelatihan anti korupsi PBJ		450.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450.000,0
01.SCF.511.051	Persiapan Pelatihan Antikorupsi PBJ	Utama	42.412,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42.412,0
01.SCF.511.052	Pelaksanaan Pelatihan Anti Korupsi PBJ	Utama	370.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370.130,0
01.SCF.511.053	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rencana Aksi	Utama	37.458,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37.458,0
Total			3.768.782,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.768.782,0

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen

3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatkan efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP

4. KEGIATAN : 5664 - Pembinaan dan Pengawasan Tugas dan Fungsi LKPP

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 17 - Inspektorat

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi		927.860,0
01.01	Persentase Pemenuhan Kapabilitas APIP pada Level 4	33.33	
01.02	Indeks Pengelolaan Integritas	Cukup	
01.03	Persentase Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	72	
01.04	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan	80	
Total			927.860,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi</i>										927.860,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										509.675,0
01.EBA.962	Layanan Umum										509.675,0
	051 - Implementasi Kapabilitas APIP LKPP										381.855,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								381.855,0
	052 - Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan										127.820,0
		Pusat	Pusat								127.820,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal										418.185,0
01.EBD.965	Layanan Audit Internal										418.185,0
	052 - Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Internal LKPP										384.315,0
		Pusat	Pusat								384.315,0
	054 - Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Lainnya										33.870,0
		Pusat	Pusat								33.870,0
Total											927.860,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi				927.860,0				0,0	0,0	0,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit		509.675,0				0,0	0,0	0,0
01.EBA.962	Layanan Umum	9	Dokumen		509.675,0	9	9	9	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962.051	Implementasi Kapabilitas APIP LKPP	0,0	Kegiatan	Infinity	381.855,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962.052	Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan	0,0	Kegiatan	Infinity	127.820,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Dokumen/ Layanan/ Laporan/ Rekomendasi		418.185,0				0,0	0,0	0,0
01.EBD.965	Layanan Audit Internal	12	Dokumen		418.185,0	18	25	32	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.EBD.965.052	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Internal LKPP	7,0	Kegiatan	54.902,1	384.315,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.965.054	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Lainnya	2,0	Kegiatan	16.935,0	33.870,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Total					927.860,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi		927.860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	927.860,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		509.675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	509.675,0
01.EBA.962	Layanan Umum		509.675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	509.675,0
01.EBA.962.051	Implementasi Kapabilitas APIP LKPP	Utama	381.855,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381.855,0
01.EBA.962.052	Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Utama	127.820,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127.820,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		418.185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	418.185,0
01.EBD.965	Layanan Audit Internal		418.185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	418.185,0
01.EBD.965.052	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Internal LKPP	Utama	384.315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	384.315,0
01.EBD.965.054	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Lainnya	Utama	33.870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33.870,0
Total			927.860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	927.860,0

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP
4. KEGIATAN : 6598 - Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi, Tata Laksana dan Pelayanan Hukum
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 01 - Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Meningkatnya capaian pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi		5.742.195,0
01.01	Indeks Kualitas Kebijakan	Baik	
01.02	Indeks Reformasi Hukum	Istimewa	
01.03	Skor komposit evaluasi kelembagaan	77	
01.04	Persentase tingkat penerapan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi	100	
01.05	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti atas pelaksanaan kegiatan RB LKPP	100	
01.06	Indeks sistem merit	Baik	
02	(Dihapus) Terwujudnya penguatan organisasi, tata laksana, dan koordinasi penerapan reformasi birokrasi		0,0
02.01	Peringkat komposit evaluasi kelembagaan	75	
02.02	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti atas pelaksanaan kegiatan RB LKPP	100	
03	(Dihapus) Meningkatnya profesionalitas SDM		0,0
03.01	Indeks sistem merit	Sangat Baik	
03.02	Indeks profesionalitas ASN	Sangat Tinggi	
Total			5.742.195,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Meningkatnya capaian pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi</i>										5.742.195,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										1.886.219,0
01.EBA.957	Layanan Hukum										306.536,0
	051 - Pelaksanaan dan Pemantauan Penyusunan Peraturan Perundang-undang										306.536,0
		Pusat	Pusat								306.536,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal										1.193.225,0
	051 - Pengelolaan Tata Laksana Organisasi										300.000,0
		Pusat	Pusat								300.000,0
	052 - Pengelolaan Kelembagaan										516.035,0
		Pusat	Pusat								516.035,0
	053 - Pelaksanaan Penilaian dan Pemantauan Reformasi Birokrasi										377.190,0
		Pusat	Pusat								377.190,0
01.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum										386.458,0
	051 - Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum										386.458,0
		Pusat	Pusat								386.458,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal										3.855.976,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM										3.855.976,0
	051 - Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan SDM										1.196.855,0
		Pusat	Pusat								1.196.855,0
	052 - Manajemen Karir dan Manajemen Talenta										2.344.142,0
		Pusat	Pusat								2.344.142,0
	053 - Administrasi Pegawai dan Sistem Informasi										314.979,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								314.979,0
Total											5.742.195,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Meningkatnya capaian pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi				5.742.195,0				0,0	0,0	0,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit		1.886.219,0				0,0	0,0	0,0
01.EBA.957	Layanan Hukum	1	Layanan		306.536,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBA.957.051	Pelaksanaan dan Pemantauan Penyusunan Peraturan Perundang-undang	1,0	Kegiatan	306.536,0	306.536,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3	Layanan		1.193.225,0	3	3	3	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.051	Pengelolaan Tata Laksana Organisasi	1,0	Kegiatan	300.000,0	300.000,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.052	Pengelolaan Kelembagaan	1,0	Kegiatan	516.035,0	516.035,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.053	Pelaksanaan Penilaian dan Pemantauan Reformasi Birokrasi	1,0	Kegiatan	377.190,0	377.190,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan		386.458,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBA.969.051	Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum	1,0	Kegiatan	386.458,0	386.458,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		Orang/ Layanan/ Rekomendasi		3.855.976,0				0,0	0,0	0,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	3	Layanan		3.855.976,0	4	4	4	0,0	0,0	0,0
01.EBC.954.051	Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan SDM	1,0	Laporan	1.196.855,0	1.196.855,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBC.954.052	Manajemen Karir dan Manajemen Talenta	12,0	Kegiatan	195.345,2	2.344.142,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0
01.EBC.954.053	Administrasi Pegawai dan Sistem Informasi	12,0	Kegiatan	26.248,3	314.979,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0
Total					5.742.195,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Meningkatnya capaian pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi		5.742.195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.742.195,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		1.886.219,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.886.219,0
01.EBA.957	Layanan Hukum		306.536,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306.536,0
01.EBA.957.051	Pelaksanaan dan Pemantauan Penyusunan Peraturan Perundang-undang	Utama	306.536,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306.536,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		1.193.225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.193.225,0
01.EBA.960.051	Pengelolaan Tata Laksana Organisasi	Utama	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
01.EBA.960.052	Pengelolaan Kelembagaan	Utama	516.035,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	516.035,0
01.EBA.960.053	Pelaksanaan Penilaian dan Pemantauan Reformasi Birokrasi	Utama	377.190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377.190,0
01.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum		386.458,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	386.458,0
01.EBA.969.051	Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum	Utama	386.458,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	386.458,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		3.855.976,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.855.976,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		3.855.976,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.855.976,0
01.EBC.954.051	Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan SDM	Utama	1.196.855,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.196.855,0
01.EBC.954.052	Manajemen Karir dan Manajemen Talenta	Utama	2.344.142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.344.142,0
01.EBC.954.053	Administrasi Pegawai dan Sistem Informasi	Utama	314.979,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314.979,0
Total			5.742.195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.742.195,0

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen

3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP

4. KEGIATAN : 6599 - Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 02 - Biro Perencanaan dan Keuangan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terpenuhinya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan anggaran		68.715.427,0
01.01	Nilai kualitas perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja	Sangat Baik	
01.02	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	Baik	
01.03	Indeks maturitas SPIP	Terdefinisi	
01.04	Persentase kesalahan administratif pada pengelolaan keuangan	5	
Total			68.715.427,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Terpenuhinya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan anggaran</i>										68.715.427,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										65.901.318,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran										65.901.318,0
	001 - Gaji dan Tunjangan										65.901.318,0
		Pusat	Pusat								65.901.318,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal										2.814.109,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penggangan										950.966,0
	051 - Penyusunan Rencana										331.862,0
		Pusat	Pusat								331.862,0
	052 - Penyusunan Anggaran										619.104,0
		Pusat	Pusat								619.104,0
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi										737.305,0
	051 - Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja dan Anggaran										402.811,0
		Pusat	Pusat								402.811,0
	052 - Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN)										37.720,0
		Pusat	Pusat								37.720,0
	053 - Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi										296.774,0
		Pusat	Pusat								296.774,0
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan										1.125.838,0
	051 - Pelayanan Verifikasi										628.572,0
		Pusat	Pusat								628.572,0
	052 - Pengelolaan Perbendaharaan										361.360,0
		Pusat	Pusat								361.360,0
	053 - Penyusunan Laporan Keuangan										135.906,0
		Pusat	Pusat								135.906,0
Total											68.715.427,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Terpenuhinya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan anggaran				68.715.427,0				0,0	0,0	0,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit		65.901.318,0				0,0	0,0	0,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan		65.901.318,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	100,0	Persen	659.013,2	65.901.318,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Dokumen/ Layanan/ Laporan/ Rekomendasi		2.814.109,0				0,0	0,0	0,0
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6	Dokumen		950.966,0	5	5	5	0,0	0,0	0,0
01.EBD.952.051	Penyusunan Rencana	3,0	Kegiatan	110.620,7	331.862,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.952.052	Penyusunan Anggaran	4,0	Kegiatan	154.776,0	619.104,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4	Dokumen		737.305,0	4	4	4	0,0	0,0	0,0
01.EBD.953.051	Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja dan Anggaran	20,0	Kegiatan	20.140,6	402.811,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.953.052	Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN)	4,0	Kegiatan	9.430,0	37.720,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.953.053	Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	1,0	Kegiatan	296.774,0	296.774,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	17	Dokumen		1.125.838,0	17	17	17	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955.051	Pelayanan Verifikasi	12,0	Kegiatan	52.381,0	628.572,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955.052	Pengelolaan Perbendaharaan	12,0	Laporan	30.113,3	361.360,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955.053	Penyusunan Laporan Keuangan	5,0	Laporan	27.181,2	135.906,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Total					68.715.427,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Terpenuhinya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan anggaran		68.715.427,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68.715.427,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		65.901.318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65.901.318,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran		65.901.318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65.901.318,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	Utama	65.901.318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65.901.318,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		2.814.109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.814.109,0
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		950.966,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950.966,0
01.EBD.952.051	Penyusunan Rencana	Utama	331.862,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	331.862,0
01.EBD.952.052	Penyusunan Anggaran	Utama	619.104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	619.104,0
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		737.305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	737.305,0
01.EBD.953.051	Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja dan Anggaran	Utama	402.811,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402.811,0
01.EBD.953.052	Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN)	Utama	37.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37.720,0
01.EBD.953.053	Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Utama	296.774,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	296.774,0
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		1.125.838,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.125.838,0
01.EBD.955.051	Pelayanan Verifikasi	Utama	628.572,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	628.572,0
01.EBD.955.052	Pengelolaan Perbendaharaan	Utama	361.360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361.360,0
01.EBD.955.053	Penyusunan Laporan Keuangan	Utama	135.906,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135.906,0
Total			68.715.427,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68.715.427,0

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP
4. KEGIATAN : 6600 - Pelayanan Hubungan Masyarakat, Tata Usaha dan Pengelolaan Operasional Perkantoran
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 23 - Biro Hubungan Masyarakat dan Umum

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas		2.214.016,0
01.01	Indeks pelayanan publik	Baik	
01.02	Indeks keterbukaan informasi publik	Menuju Informatif	
01.03	Predikat Pelayanan Publik Berbasis HAM	Tersedia	
02	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan umum internal		42.724.457,0
02.01	Hasil pengawasan kearsipan	Sangat Baik	
02.02	Indeks tata kelola pengadaan	Sangat Baik	
02.03	Indeks pengelolaan aset	3,35	
02.04	Indeks layanan penyelenggaraan ketatausahaan	Baik	
02.05	Indeks layanan keprotokolan	Baik	
02.06	Indeks Kepuasan Pegawai Atas Layanan Kerumahtanggaan	Memuaskan	
03	(Dihapus) Terwujudnya layanan data, sistem informasi dan infrastruktur TIK yang andal dan responsif		0,0
Total			44.938.473,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas</i>										2.214.016,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										2.214.016,0
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi										2.214.016,0
	051 - Dokumentasi dan Peliputan										340.822,0
		Pusat	Pusat								340.822,0
	052 - Publikasi dan Pemberitaan Media										1.354.494,0
		Pusat	Pusat								1.354.494,0
	053 - Pelayanan Publik di LKPP										240.896,0
		Pusat	Pusat								240.896,0
	054 - Survei Kepuasan Masyarakat										210.654,0
		Pusat	Pusat								210.654,0
	055 - Pelaksanaan Kerjasama										35.700,0
		Pusat	Pusat								35.700,0
	056 - Pengelolaan Perpustakaan										31.450,0
		Pusat	Pusat								31.450,0
02	<i>Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan umum internal</i>										42.724.457,0
02.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										42.111.047,0
02.EBA.956	Layanan BMN										466.690,0
	051 - Penatausahaan dan Monitoring BMN										322.107,0
		Pusat	Pusat								322.107,0
	052 - Pemusnahan dan Penghapusan BMN										89.943,0
		Pusat	Pusat								89.943,0
	053 - Penyusunan laporan BMN										54.640,0
		Pusat	Pusat								54.640,0
02.EBA.959	Layanan Protokoler										1.110.375,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Penyiapan dan Penyelenggaraan Pendampingan Kegiatan Pimpinan										241.161,0
		Pusat	Pusat								241.161,0
	052 - Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan										869.214,0
		Pusat	Pusat								869.214,0
02.EBA.962	Layanan Umum										5.732.269,0
	051 - Pelayanan Dukungan Manajemen Eselon I										4.744.523,0
		Pusat	Pusat								4.744.523,0
	052 - Pelayanan Pengadaan LKPP										987.746,0
		Pusat	Pusat								987.746,0
02.EBA.994	Layanan Perkantoran										34.801.713,0
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor										34.801.713,0
		Pusat	Pusat								34.801.713,0
02.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal										613.410,0
02.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan										613.410,0
	051 - Pengembangan SDM dan Tata Kelola Kearsipan										85.940,0
		Pusat	Pusat								85.940,0
	052 - Pelaksanaan Kegiatan Teknis Kearsipan										398.670,0
		Pusat	Pusat								398.670,0
	053 - Pemantauan, Evaluasi, dan Pembinaan Kearsipan										128.800,0
		Pusat	Pusat								128.800,0
Total											44.938.473,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas				2.214.016,0				0,0	0,0	0,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit		2.214.016,0				0,0	0,0	0,0
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	6	Layanan		2.214.016,0	6	6	6	0,0	0,0	0,0
01.EBA.958.051	Dokumentasi dan Peliputan	12,0	Kegiatan	28.401,8	340.822,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.958.052	Publikasi dan Pemberitaan Media	3,0	Kegiatan	451.498,0	1.354.494,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.958.053	Pelayanan Publik di LKPP	4,0	Kegiatan	60.224,0	240.896,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.958.054	Survei Kepuasan Masyarakat	1,0	Laporan	210.654,0	210.654,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.958.055	Pelaksanaan Kerjasama	1,0	Laporan	35.700,0	35.700,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.958.056	Pengelolaan Perpustakaan	1,0	Laporan	31.450,0	31.450,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan umum internal				42.724.457,0				0,0	0,0	0,0
02.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit		42.111.047,0				0,0	0,0	0,0
02.EBA.956	Layanan BMN	1	Layanan		466.690,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
02.EBA.956.051	Penatausahaan dan Monitoring BMN	1,0	Layanan	322.107,0	322.107,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.EBA.956.052	Pemusnahan dan Penghapusan BMN	1,0	Layanan	89.943,0	89.943,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.EBA.956.053	Penyusunan laporan BMN	4,0	Laporan	13.660,0	54.640,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
02.EBA.959	Layanan Protokoler	1	Layanan		1.110.375,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
02.EBA.959.051	Penyiapan dan Penyelenggaraan Pendampingan Kegiatan Pimpinan	1,0	Layanan	241.161,0	241.161,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.EBA.959.052	Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan	1,0	Layanan	869.214,0	869.214,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan		5.732.269,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
02.EBA.962.051	Pelayanan Dukungan Manajemen Eselon I	1,0	Layanan	4.744.523,0	4.744.523,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.EBA.962.052	Pelayanan Pengadaan LKPP	1,0	Layanan	987.746,0	987.746,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan		34.801.713,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
02.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	100,0	Persen	348.017,1	34.801.713,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
02.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Dokumen/ Layanan/ Laporan/ Rekomendasi		613.410,0				0,0	0,0	0,0
02.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Dokumen		613.410,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02.EBD.974.051	Pengembangan SDM dan Tata Kelola Kearsipan	1,0	Layanan	85.940,0	85.940,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.EBD.974.052	Pelaksanaan Kegiatan Teknis Kearsipan	1,0	Layanan	398.670,0	398.670,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.EBD.974.053	Pemantauan, Evaluasi, dan Pembinaan Kearsipan	1,0	Layanan	128.800,0	128.800,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Total					44.938.473,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										TOTAL
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	
01	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas		2.214.016,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.214.016,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		2.214.016,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.214.016,0
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		2.214.016,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.214.016,0
01.EBA.958.051	Dokumentasi dan Peliputan	Utama	340.822,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340.822,0
01.EBA.958.052	Publikasi dan Pemberitaan Media	Utama	1.354.494,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.354.494,0
01.EBA.958.053	Pelayanan Publik di LKPP	Utama	240.896,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240.896,0
01.EBA.958.054	Survei Kepuasan Masyarakat	Utama	210.654,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210.654,0
01.EBA.958.055	Pelaksanaan Kerjasama	Utama	35.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35.700,0
01.EBA.958.056	Pengelolaan Perpustakaan	Utama	31.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31.450,0
02	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan umum internal		42.724.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42.724.457,0
02.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		42.111.047,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42.111.047,0
02.EBA.956	Layanan BMN		466.690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	466.690,0
02.EBA.956.051	Penatausahaan dan Monitoring BMN	Utama	322.107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	322.107,0
02.EBA.956.052	Pemusnahan dan Penghapusan BMN	Utama	89.943,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89.943,0
02.EBA.956.053	Penyusunan laporan BMN	Utama	54.640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54.640,0
02.EBA.959	Layanan Protokoler		1.110.375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.110.375,0
02.EBA.959.051	Penyiapan dan Penyelenggaraan Pendampingan Kegiatan Pimpinan	Utama	241.161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	241.161,0
02.EBA.959.052	Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan	Utama	869.214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	869.214,0
02.EBA.962	Layanan Umum		5.732.269,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.732.269,0
02.EBA.962.051	Pelayanan Dukungan Manajemen Eselon I	Utama	4.744.523,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.744.523,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.EBA.962.052	Pelayanan Pengadaan LKPP	Utama	987.746,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	987.746,0
02.EBA.994	Layanan Perkantoran		34.801.713,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34.801.713,0
02.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Utama	34.801.713,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34.801.713,0
02.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		613.410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	613.410,0
02.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		613.410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	613.410,0
02.EBD.974.051	Pengembangan SDM dan Tata Kelola Kearsipan	Utama	85.940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85.940,0
02.EBD.974.052	Pelaksanaan Kegiatan Teknis Kearsipan	Utama	398.670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	398.670,0
02.EBD.974.053	Pemantauan, Evaluasi, dan Pembinaan Kearsipan	Utama	128.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128.800,0
Total			44.938.473,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44.938.473,0

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP
4. KEGIATAN : 7033 - Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Infrastruktur TIK
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 24 - Pusat Data dan Informasi

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terwujudnya Layanan Data yang Informatif		1.309.245,0
01.01	Indeks Pembangunan Statistik	2,6	
01.02	Persentase Pemenuhan Data Prioritas	20	
02	Terselenggaranya Platform Manajemen Perkantoran Terintegrasi dan Sistem Pendukung PBJ		1.509.510,0
02.01	Persentase Pembangunan dan Pengintegrasian Sistem Informasi manajemen perkantoran	3	
02.02	Persentase Pembangunan dan Pengintegrasian Sistem Informasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	0	
02.03	Persentase Terpeliharanya Sistem Informasi manajemen perkantoran	20	
02.04	Persentase Terpeliharanya Sistem Informasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	10	
03	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Informasi TIK yang andal dan responsif		4.529.180,0
03.01	Persentase Ketersediaan Layanan Jaringan Perkantoran	70	
03.02	Persentase Ketersediaan Layanan Komputasi	70	
03.03	Indeks Cyber Security Maturity (CSM)	3,7	
03.04	Persentase Insiden Keamanan Informasi yang ditangani	10	
04	Terwujudnya tata kelola Pusdatin dan SPBE yang akuntabel		1.771.013,0
04.01	Nilai SAKIP Pusdatin	65	
04.02	Indeks SPBE	3,57	
04.03	Hasil Survei Kepuasan Layanan Pusdatin	2,5	
Total			9.118.948,0

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Terwujudnya Layanan Data yang Informatif</i>										1.309.245,0
01.BMA	Data dan Informasi Publik										1.309.245,0
01.BMA.963	Layanan Data Warehouse Walidata LKPP										1.309.245,0
	051 - Identifikasi Kebutuhan										38.095,0
		Pusat	Pusat								38.095,0
	052 - Penyediaan Layanan Data Warehouse Walidata LKPP										1.271.150,0
		Pusat	Pusat								1.271.150,0
02	<i>Terselenggaranya Platform Manajemen Perkantoran Terintegrasi dan Sistem Pendukung PBj</i>										1.509.510,0
02.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan										1.509.510,0
02.FAB.963	Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah										1.509.510,0
	051 - Identifikasi Kebutuhan Pengembangan										46.360,0
		Pusat	Pusat								46.360,0
	052 - Pengembangan Sistem Aplikasi										1.463.150,0
		Pusat	Pusat								1.463.150,0
03	<i>Terwujudnya Layanan Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Informasi TIK yang andal dan responsif</i>										4.529.180,0
03.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi										4.529.180,0
03.CCL.963	Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi										4.529.180,0
	051 - Identifikasi Kebutuhan Sarana										15.660,0
		Pusat	Pusat								15.660,0
	052 - Penyediaan Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi										3.649.783,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								3.649.783,0
	053 - Pengelolaan Keamanan Informasi										863.737,0
		Pusat	Pusat								863.737,0
04	<i>Terwujudnya tata kelola Pusdatin dan SPBE yang akuntabel</i>										1.771.013,0
04.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										1.771.013,0
04.EBA.963	Layanan Data dan Informasi										1.771.013,0
	051 - Identifikasi Pengelolaan Layanan										51.871,0
		Pusat	Pusat								51.871,0
	052 - Pengelolaan Layanan Data dan Informasi										1.719.142,0
		Pusat	Pusat								1.719.142,0
Total											9.118.948,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Terwujudnya Layanan Data yang Informatif				1.309.245,0				0,0	0,0	0,0
01.BMA	Data dan Informasi Publik		layanan/ dokumen/ publikasi/ Wilayah/ Peta/ Data/ Lokasi		1.309.245,0				0,0	0,0	0,0
01.BMA.963	Layanan Data Warehouse Walidata LKPP	1	layanan		1.309.245,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.BMA.963.051	Identifikasi Kebutuhan	1,0	Kegiatan	38.095,0	38.095,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.BMA.963.052	Penyediaan Layanan Data Warehouse Walidata LKPP	1,0	Kegiatan	1.271.150,0	1.271.150,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02	Terselenggaranya Platform Manajemen Perkantoran Terintegrasi dan Sistem Pendukung PBJ				1.509.510,0				0,0	0,0	0,0
02.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan		Sistem Informasi/ Modul Aplikasi/ Layanan		1.509.510,0				0,0	0,0	0,0
02.FAB.963	Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	Sistem Informasi		1.509.510,0	5	5	5	0,0	0,0	0,0
02.FAB.963.051	Identifikasi Kebutuhan Pengembangan	1,0	Kegiatan	46.360,0	46.360,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.FAB.963.052	Pengembangan Sistem Aplikasi	5,0	Laporan	292.630,0	1.463.150,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
03	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Informasi TIK yang andal dan responsif				4.529.180,0				0,0	0,0	0,0
03.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit		4.529.180,0				0,0	0,0	0,0
03.CCL.963	Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	10	Unit		4.529.180,0	16	16	16	0,0	0,0	0,0
03.CCL.963.051	Identifikasi Kebutuhan Sarana	1,0	Kegiatan	15.660,0	15.660,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03.CCL.963.052	Penyediaan Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	10,0	Laporan	364.978,3	3.649.783,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
03.CCL.963.053	Pengelolaan Keamanan Informasi	1,0	Laporan	863.737,0	863.737,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
04	Terwujudnya tata kelola Pusdatin dan SPBE yang akuntabel				1.771.013,0				0,0	0,0	0,0
04.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit		1.771.013,0				0,0	0,0	0,0
04.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan		1.771.013,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
04.EBA.963.051	Identifikasi Pengelolaan Layanan	1,0	Kegiatan	51.871,0	51.871,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
04.EBA.963.052	Pengelolaan Layanan Data dan Informasi	1,0	Kegiatan	1.719.142,0	1.719.142,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Total					9.118.948,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Terwujudnya Layanan Data yang Informatif		1.309.245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.309.245,0
01.BMA	Data dan Informasi Publik		1.309.245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.309.245,0
01.BMA.963	Layanan Data Warehouse Walidata LKPP		1.309.245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.309.245,0
01.BMA.963.051	Identifikasi Kebutuhan	Utama	38.095,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38.095,0
01.BMA.963.052	Penyediaan Layanan Data Warehouse Walidata LKPP	Utama	1.271.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.271.150,0
02	Terselenggaranya Platform Manajemen Perkantoran Terintegrasi dan Sistem Pendukung PBJ		1.509.510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.509.510,0
02.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan		1.509.510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.509.510,0
02.FAB.963	Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		1.509.510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.509.510,0
02.FAB.963.051	Identifikasi Kebutuhan Pengembangan	Utama	46.360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46.360,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.FAB.963.052	Pengembangan Sistem Aplikasi	Utama	1.463.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.463.150,0
03	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Informasi TIK yang andal dan responsif		4.529.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.529.180,0
03.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		4.529.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.529.180,0
03.CCL.963	Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi		4.529.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.529.180,0
03.CCL.963.051	Identifikasi Kebutuhan Sarana	Utama	15.660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.660,0
03.CCL.963.052	Penyediaan Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Utama	3.649.783,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.649.783,0
03.CCL.963.053	Pengelolaan Keamanan Informasi	Utama	863.737,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	863.737,0
04	Terwujudnya tata kelola Pusdatin dan SPBE yang akuntabel		1.771.013,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.771.013,0
04.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		1.771.013,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.771.013,0
04.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		1.771.013,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.771.013,0
04.EBA.963.051	Identifikasi Pengelolaan Layanan	Utama	51.871,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51.871,0
04.EBA.963.052	Pengelolaan Layanan Data dan Informasi	Utama	1.719.142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.719.142,0
Total			9.118.948,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.118.948,0

REKAP 3A: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen

3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP

4. KEGIATAN : 5664 - Pembinaan dan Pengawasan Tugas dan Fungsi LKPP

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 17 - Inspektorat

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi		927.860,0
01.01	Persentase Pemenuhan Kapabilitas APIP pada Level 4	33.33	
01.02	Indeks Pengelolaan Integritas	Cukup	
01.03	Persentase Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	72	
01.04	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan	80	
Total			927.860,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi</i>										927.860,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										509.675,0
01.EBA.962	Layanan Umum										509.675,0
	051 - Implementasi Kapabilitas APIP LKPP										381.855,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								381.855,0
	052 - Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan										127.820,0
		Pusat	Pusat								127.820,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal										418.185,0
01.EBD.965	Layanan Audit Internal										418.185,0
	052 - Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Internal LKPP										384.315,0
		Pusat	Pusat								384.315,0
	054 - Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Lainnya										33.870,0
		Pusat	Pusat								33.870,0
Total											927.860,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi				927.860,0				0,0	0,0	0,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit		509.675,0				0,0	0,0	0,0
01.EBA.962	Layanan Umum	9	Dokumen		509.675,0	9	9	9	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962.051	Implementasi Kapabilitas APIP LKPP	0,0	Kegiatan	0,0	381.855,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962.052	Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan	0,0	Kegiatan	0,0	127.820,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Dokumen/ Layanan/ Laporan/ Rekomendasi		418.185,0				0,0	0,0	0,0
01.EBD.965	Layanan Audit Internal	12	Dokumen		418.185,0	18	25	32	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.EBD.965.052	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Internal LKPP	7,0	Kegiatan	54.902,1	384.315,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.965.054	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Lainnya	2,0	Kegiatan	16.935,0	33.870,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Total					927.860,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi		927.860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	927.860,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		509.675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	509.675,0
01.EBA.962	Layanan Umum		509.675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	509.675,0
01.EBA.962.051	Implementasi Kapabilitas APIP LKPP	Utama	381.855,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381.855,0
01.EBA.962.052	Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Utama	127.820,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127.820,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		418.185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	418.185,0
01.EBD.965	Layanan Audit Internal		418.185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	418.185,0
01.EBD.965.052	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Internal LKPP	Utama	384.315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	384.315,0
01.EBD.965.054	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Lainnya	Utama	33.870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33.870,0
Total			927.860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	927.860,0

REKAP 3A: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen

3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP

4. KEGIATAN : 6598 - Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi, Tata Laksana dan Pelayanan Hukum

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 01 - Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Meningkatnya capaian pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi		5.742.195,0
01.01	Indeks Kualitas Kebijakan	Baik	
01.02	Indeks Reformasi Hukum	Istimewa	
01.03	Skor komposit evaluasi kelembagaan	77	
01.04	Persentase tingkat penerapan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi	100	
01.05	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti atas pelaksanaan kegiatan RB LKPP	100	
01.06	Indeks sistem merit	Baik	
Total			5.742.195,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Meningkatnya capaian pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi</i>										5.742.195,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										1.886.219,0
01.EBA.957	Layanan Hukum										306.536,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Pelaksanaan dan Pemantauan Penyusunan Peraturan Perundang-undang										306.536,0
		Pusat	Pusat								306.536,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal										1.193.225,0
	051 - Pengelolaan Tata Laksana Organisasi										300.000,0
		Pusat	Pusat								300.000,0
	052 - Pengelolaan Kelembagaan										516.035,0
		Pusat	Pusat								516.035,0
	053 - Pelaksanaan Penilaian dan Pemantauan Reformasi Birokrasi										377.190,0
		Pusat	Pusat								377.190,0
01.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum										386.458,0
	051 - Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum										386.458,0
		Pusat	Pusat								386.458,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal										3.855.976,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM										3.855.976,0
	051 - Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan SDM										1.196.855,0
		Pusat	Pusat								1.196.855,0
	052 - Manajemen Karir dan Manajemen Talenta										2.344.142,0
		Pusat	Pusat								2.344.142,0
	053 - Administrasi Pegawai dan Sistem Informasi										314.979,0
		Pusat	Pusat								314.979,0
Total											5.742.195,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Meningkatnya capaian pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi				5.742.195,0				0,0	0,0	0,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit		1.886.219,0				0,0	0,0	0,0
01.EBA.957	Layanan Hukum	1	Layanan		306.536,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBA.957.051	Pelaksanaan dan Pemantauan Penyusunan Peraturan Perundang-undang	1,0	Kegiatan	306.536,0	306.536,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3	Layanan		1.193.225,0	3	3	3	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.051	Pengelolaan Tata Laksana Organisasi	1,0	Kegiatan	300.000,0	300.000,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.052	Pengelolaan Kelembagaan	1,0	Kegiatan	516.035,0	516.035,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.053	Pelaksanaan Penilaian dan Pemantauan Reformasi Birokrasi	1,0	Kegiatan	377.190,0	377.190,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan		386.458,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBA.969.051	Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum	1,0	Kegiatan	386.458,0	386.458,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		Orang/ Layanan/ Rekomendasi		3.855.976,0				0,0	0,0	0,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	3	Layanan		3.855.976,0	4	4	4	0,0	0,0	0,0
01.EBC.954.051	Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan SDM	1,0	Laporan	1.196.855,0	1.196.855,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBC.954.052	Manajemen Karir dan Manajemen Talenta	12,0	Kegiatan	195.345,2	2.344.142,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0
01.EBC.954.053	Administrasi Pegawai dan Sistem Informasi	12,0	Kegiatan	26.248,3	314.979,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0
Total					5.742.195,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Meningkatnya capaian pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi		5.742.195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.742.195,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		1.886.219,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.886.219,0
01.EBA.957	Layanan Hukum		306.536,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306.536,0
01.EBA.957.051	Pelaksanaan dan Pemantauan Penyusunan Peraturan Perundang-undang	Utama	306.536,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306.536,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		1.193.225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.193.225,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.EBA.960.051	Pengelolaan Tata Laksana Organisasi	Utama	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
01.EBA.960.052	Pengelolaan Kelembagaan	Utama	516.035,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	516.035,0
01.EBA.960.053	Pelaksanaan Penilaian dan Pemantauan Reformasi Birokrasi	Utama	377.190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377.190,0
01.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum		386.458,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	386.458,0
01.EBA.969.051	Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum	Utama	386.458,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	386.458,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		3.855.976,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.855.976,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		3.855.976,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.855.976,0
01.EBC.954.051	Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan SDM	Utama	1.196.855,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.196.855,0
01.EBC.954.052	Manajemen Karir dan Manajemen Talenta	Utama	2.344.142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.344.142,0
01.EBC.954.053	Administrasi Pegawai dan Sistem Informasi	Utama	314.979,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314.979,0
Total			5.742.195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.742.195,0

REKAP 3A: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen

3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP

4. KEGIATAN : 6599 - Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 02 - Biro Perencanaan dan Keuangan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terpenuhinya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan anggaran		68.715.427,0
01.01	Nilai kualitas perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja	Sangat Baik	
01.02	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	Baik	
01.03	Indeks maturitas SPIP	Terdefinisi	
01.04	Persentase kesalahan administratif pada pengelolaan keuangan	5	
Total			68.715.427,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Terpenuhinya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan anggaran</i>										68.715.427,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										65.901.318,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran										65.901.318,0
	001 - Gaji dan Tunjangan										65.901.318,0
		Pusat	Pusat								65.901.318,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal										2.814.109,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran										950.966,0
	051 - Penyusunan Rencana										331.862,0
		Pusat	Pusat								331.862,0
	052 - Penyusunan Anggaran										619.104,0
		Pusat	Pusat								619.104,0
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi										737.305,0
	051 - Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja dan Anggaran										402.811,0
		Pusat	Pusat								402.811,0
	052 - Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN)										37.720,0
		Pusat	Pusat								37.720,0
	053 - Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi										296.774,0
		Pusat	Pusat								296.774,0
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan										1.125.838,0
	051 - Pelayanan Verifikasi										628.572,0
		Pusat	Pusat								628.572,0
	052 - Pengelolaan Perbendaharaan										361.360,0
		Pusat	Pusat								361.360,0
	053 - Penyusunan Laporan Keuangan										135.906,0
		Pusat	Pusat								135.906,0
Total											68.715.427,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Terpenuhinya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan anggaran				68.715.427,0				0,0	0,0	0,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit		65.901.318,0				0,0	0,0	0,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan		65.901.318,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	100,0	Persen	659.013,2	65.901.318,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Dokumen/ Layanan/ Laporan/ Rekomendasi		2.814.109,0				0,0	0,0	0,0
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6	Dokumen		950.966,0	5	5	5	0,0	0,0	0,0
01.EBD.952.051	Penyusunan Rencana	3,0	Kegiatan	110.620,7	331.862,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.952.052	Penyusunan Anggaran	4,0	Kegiatan	154.776,0	619.104,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4	Dokumen		737.305,0	4	4	4	0,0	0,0	0,0
01.EBD.953.051	Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja dan Anggaran	20,0	Kegiatan	20.140,6	402.811,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.953.052	Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN)	4,0	Kegiatan	9.430,0	37.720,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.953.053	Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	1,0	Kegiatan	296.774,0	296.774,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	17	Dokumen		1.125.838,0	17	17	17	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955.051	Pelayanan Verifikasi	12,0	Kegiatan	52.381,0	628.572,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955.052	Pengelolaan Perbendaharaan	12,0	Laporan	30.113,3	361.360,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955.053	Penyusunan Laporan Keuangan	5,0	Laporan	27.181,2	135.906,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Total					68.715.427,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Terpenuhinya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan anggaran		68.715.427,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68.715.427,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		65.901.318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65.901.318,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran		65.901.318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65.901.318,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	Utama	65.901.318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65.901.318,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		2.814.109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.814.109,0
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		950.966,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950.966,0
01.EBD.952.051	Penyusunan Rencana	Utama	331.862,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	331.862,0
01.EBD.952.052	Penyusunan Anggaran	Utama	619.104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	619.104,0
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		737.305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	737.305,0
01.EBD.953.051	Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja dan Anggaran	Utama	402.811,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402.811,0
01.EBD.953.052	Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN)	Utama	37.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37.720,0
01.EBD.953.053	Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Utama	296.774,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	296.774,0
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		1.125.838,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.125.838,0
01.EBD.955.051	Pelayanan Verifikasi	Utama	628.572,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	628.572,0
01.EBD.955.052	Pengelolaan Perbendaharaan	Utama	361.360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361.360,0
01.EBD.955.053	Penyusunan Laporan Keuangan	Utama	135.906,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135.906,0
Total			68.715.427,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68.715.427,0

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP
4. KEGIATAN : 6600 - Pelayanan Hubungan Masyarakat, Tata Usaha dan Pengelolaan Operasional Perkantoran
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 23 - Biro Hubungan Masyarakat dan Umum

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas		2.214.016,0
01.01	Indeks pelayanan publik	Baik	
01.02	Indeks keterbukaan informasi publik	Menuju Informatif	
01.03	Predikat Pelayanan Publik Berbasis HAM	Tersedia	
02	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan umum internal		42.724.457,0
02.01	Hasil pengawasan kearsipan	Sangat Baik	
02.02	Indeks tata kelola pengadaan	Sangat Baik	
02.03	Indeks pengelolaan aset	3,35	
02.04	Indeks layanan penyelenggaraan ketatausahaan	Baik	
02.05	Indeks layanan keprotokolan	Baik	
02.06	Indeks Kepuasan Pegawai Atas Layanan Kerumahtanggaan	Memuaskan	
Total			44.938.473,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas</i>										2.214.016,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										2.214.016,0
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi										2.214.016,0
	051 - Dokumentasi dan Peliputan										340.822,0
		Pusat	Pusat								340.822,0
	052 - Publikasi dan Pemberitaan Media										1.354.494,0
		Pusat	Pusat								1.354.494,0
	053 - Pelayanan Publik di LKPP										240.896,0
		Pusat	Pusat								240.896,0
	054 - Survei Kepuasan Masyarakat										210.654,0
		Pusat	Pusat								210.654,0
	055 - Pelaksanaan Kerjasama										35.700,0
		Pusat	Pusat								35.700,0
	056 - Pengelolaan Perpustakaan										31.450,0
		Pusat	Pusat								31.450,0
02	<i>Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan umum internal</i>										42.724.457,0
02.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										42.111.047,0
02.EBA.956	Layanan BMN										466.690,0
	051 - Penatausahaan dan Monitoring BMN										322.107,0
		Pusat	Pusat								322.107,0
	052 - Pemusnahan dan Penghapusan BMN										89.943,0
		Pusat	Pusat								89.943,0
	053 - Penyusunan laporan BMN										54.640,0
		Pusat	Pusat								54.640,0
02.EBA.959	Layanan Protokoler										1.110.375,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Penyiapan dan Penyelenggaraan Pendampingan Kegiatan Pimpinan										241.161,0
		Pusat	Pusat								241.161,0
	052 - Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan										869.214,0
		Pusat	Pusat								869.214,0
02.EBA.962	Layanan Umum										5.732.269,0
	051 - Pelayanan Dukungan Manajemen Eselon I										4.744.523,0
		Pusat	Pusat								4.744.523,0
	052 - Pelayanan Pengadaan LKPP										987.746,0
		Pusat	Pusat								987.746,0
02.EBA.994	Layanan Perkantoran										34.801.713,0
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor										34.801.713,0
		Pusat	Pusat								34.801.713,0
02.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal										613.410,0
02.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan										613.410,0
	051 - Pengembangan SDM dan Tata Kelola Kearsipan										85.940,0
		Pusat	Pusat								85.940,0
	052 - Pelaksanaan Kegiatan Teknis Kearsipan										398.670,0
		Pusat	Pusat								398.670,0
	053 - Pemantauan, Evaluasi, dan Pembinaan Kearsipan										128.800,0
		Pusat	Pusat								128.800,0
Total											44.938.473,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas				2.214.016,0				0,0	0,0	0,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit		2.214.016,0				0,0	0,0	0,0
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	6	Layanan		2.214.016,0	6	6	6	0,0	0,0	0,0
01.EBA.958.051	Dokumentasi dan Peliputan	12,0	Kegiatan	28.401,8	340.822,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.958.052	Publikasi dan Pemberitaan Media	3,0	Kegiatan	451.498,0	1.354.494,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.958.053	Pelayanan Publik di LKPP	4,0	Kegiatan	60.224,0	240.896,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.958.054	Survei Kepuasan Masyarakat	1,0	Laporan	210.654,0	210.654,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.958.055	Pelaksanaan Kerjasama	1,0	Laporan	35.700,0	35.700,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.958.056	Pengelolaan Perpustakaan	1,0	Laporan	31.450,0	31.450,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan umum internal				42.724.457,0				0,0	0,0	0,0
02.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit		42.111.047,0				0,0	0,0	0,0
02.EBA.956	Layanan BMN	1	Layanan		466.690,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
02.EBA.956.051	Penatausahaan dan Monitoring BMN	1,0	Layanan	322.107,0	322.107,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.EBA.956.052	Pemusnahan dan Penghapusan BMN	1,0	Layanan	89.943,0	89.943,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.EBA.956.053	Penyusunan laporan BMN	4,0	Laporan	13.660,0	54.640,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
02.EBA.959	Layanan Protokoler	1	Layanan		1.110.375,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
02.EBA.959.051	Penyiapan dan Penyelenggaraan Pendampingan Kegiatan Pimpinan	1,0	Layanan	241.161,0	241.161,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.EBA.959.052	Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan	1,0	Layanan	869.214,0	869.214,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan		5.732.269,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
02.EBA.962.051	Pelayanan Dukungan Manajemen Eselon I	1,0	Layanan	4.744.523,0	4.744.523,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.EBA.962.052	Pelayanan Pengadaan LKPP	1,0	Layanan	987.746,0	987.746,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan		34.801.713,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
02.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	100,0	Persen	348.017,1	34.801.713,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
02.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Dokumen/ Layanan/ Laporan/ Rekomendasi		613.410,0				0,0	0,0	0,0
02.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Dokumen		613.410,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02.EBD.974.051	Pengembangan SDM dan Tata Kelola Kearsipan	1,0	Layanan	85.940,0	85.940,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.EBD.974.052	Pelaksanaan Kegiatan Teknis Kearsipan	1,0	Layanan	398.670,0	398.670,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.EBD.974.053	Pemantauan, Evaluasi, dan Pembinaan Kearsipan	1,0	Layanan	128.800,0	128.800,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Total					44.938.473,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										TOTAL
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	
01	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas		2.214.016,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.214.016,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		2.214.016,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.214.016,0
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		2.214.016,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.214.016,0
01.EBA.958.051	Dokumentasi dan Peliputan	Utama	340.822,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340.822,0
01.EBA.958.052	Publikasi dan Pemberitaan Media	Utama	1.354.494,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.354.494,0
01.EBA.958.053	Pelayanan Publik di LKPP	Utama	240.896,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240.896,0
01.EBA.958.054	Survei Kepuasan Masyarakat	Utama	210.654,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210.654,0
01.EBA.958.055	Pelaksanaan Kerjasama	Utama	35.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35.700,0
01.EBA.958.056	Pengelolaan Perpustakaan	Utama	31.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31.450,0
02	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan umum internal		42.724.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42.724.457,0
02.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		42.111.047,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42.111.047,0
02.EBA.956	Layanan BMN		466.690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	466.690,0
02.EBA.956.051	Penatausahaan dan Monitoring BMN	Utama	322.107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	322.107,0
02.EBA.956.052	Pemusnahan dan Penghapusan BMN	Utama	89.943,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89.943,0
02.EBA.956.053	Penyusunan laporan BMN	Utama	54.640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54.640,0
02.EBA.959	Layanan Protokoler		1.110.375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.110.375,0
02.EBA.959.051	Penyiapan dan Penyelenggaraan Pendampingan Kegiatan Pimpinan	Utama	241.161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	241.161,0
02.EBA.959.052	Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan	Utama	869.214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	869.214,0
02.EBA.962	Layanan Umum		5.732.269,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.732.269,0
02.EBA.962.051	Pelayanan Dukungan Manajemen Eselon I	Utama	4.744.523,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.744.523,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.EBA.962.052	Pelayanan Pengadaan LKPP	Utama	987.746,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	987.746,0
02.EBA.994	Layanan Perkantoran		34.801.713,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34.801.713,0
02.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Utama	34.801.713,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34.801.713,0
02.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		613.410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	613.410,0
02.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		613.410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	613.410,0
02.EBD.974.051	Pengembangan SDM dan Tata Kelola Kearsipan	Utama	85.940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85.940,0
02.EBD.974.052	Pelaksanaan Kegiatan Teknis Kearsipan	Utama	398.670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	398.670,0
02.EBD.974.053	Pemantauan, Evaluasi, dan Pembinaan Kearsipan	Utama	128.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128.800,0
Total			44.938.473,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44.938.473,0

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen

3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP

4. KEGIATAN : 7033 - Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Infrastruktur TIK

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 24 - Pusat Data dan Informasi

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terwujudnya Layanan Data yang Informatif		1.309.245,0
01.01	Indeks Pembangunan Statistik	2,6	
01.02	Persentase Pemenuhan Data Prioritas	20	
02	Terselenggaranya Platform Manajemen Perkantoran Terintegrasi dan Sistem Pendukung PBJ		1.509.510,0
02.01	Persentase Pembangunan dan Pengintegrasian Sistem Informasi manajemen perkantoran	3	
02.02	Persentase Pembangunan dan Pengintegrasian Sistem Informasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	0	
02.03	Persentase Terpeliharanya Sistem Informasi manajemen perkantoran	20	
02.04	Persentase Terpeliharanya Sistem Informasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	10	
03	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Informasi TIK yang andal dan responsif		4.529.180,0
03.01	Persentase Ketersediaan Layanan Jaringan Perkantoran	70	
03.02	Persentase Ketersediaan Layanan Komputasi	70	
03.03	Indeks Cyber Security Maturity (CSM)	3,7	
03.04	Persentase Insiden Keamanan Informasi yang ditangani	10	
04	Terwujudnya tata kelola Pusdatin dan SPBE yang akuntabel		1.771.013,0
04.01	Nilai SAKIP Pusdatin	65	
04.02	Indeks SPBE	3,57	
04.03	Hasil Survei Kepuasan Layanan Pusdatin	2,5	
Total			9.118.948,0

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Terwujudnya Layanan Data yang Informatif</i>										1.309.245,0
01.BMA	Data dan Informasi Publik										1.309.245,0
01.BMA.963	Layanan Data Warehouse Walidata LKPP										1.309.245,0
	051 - Identifikasi Kebutuhan										38.095,0
		Pusat	Pusat								38.095,0
	052 - Penyediaan Layanan Data Warehouse Walidata LKPP										1.271.150,0
		Pusat	Pusat								1.271.150,0
02	<i>Terselenggaranya Platform Manajemen Perkantoran Terintegrasi dan Sistem Pendukung PBj</i>										1.509.510,0
02.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan										1.509.510,0
02.FAB.963	Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah										1.509.510,0
	051 - Identifikasi Kebutuhan Pengembangan										46.360,0
		Pusat	Pusat								46.360,0
	052 - Pengembangan Sistem Aplikasi										1.463.150,0
		Pusat	Pusat								1.463.150,0
03	<i>Terwujudnya Layanan Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Informasi TIK yang andal dan responsif</i>										4.529.180,0
03.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi										4.529.180,0
03.CCL.963	Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi										4.529.180,0
	051 - Identifikasi Kebutuhan Sarana										15.660,0
		Pusat	Pusat								15.660,0
	052 - Penyediaan Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi										3.649.783,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								3.649.783,0
	053 - Pengelolaan Keamanan Informasi										863.737,0
		Pusat	Pusat								863.737,0
04	<i>Terwujudnya tata kelola Pusdatin dan SPBE yang akuntabel</i>										1.771.013,0
04.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										1.771.013,0
04.EBA.963	Layanan Data dan Informasi										1.771.013,0
	051 - Identifikasi Pengelolaan Layanan										51.871,0
		Pusat	Pusat								51.871,0
	052 - Pengelolaan Layanan Data dan Informasi										1.719.142,0
		Pusat	Pusat								1.719.142,0
Total											9.118.948,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Terwujudnya Layanan Data yang Informatif				1.309.245,0				0,0	0,0	0,0
01.BMA	Data dan Informasi Publik		layanan/ dokumen/ publikasi/ Wilayah/ Peta/ Data/ Lokasi		1.309.245,0				0,0	0,0	0,0
01.BMA.963	Layanan Data Warehouse Walidata LKPP	1	layanan		1.309.245,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.BMA.963.051	Identifikasi Kebutuhan	1,0	Kegiatan	38.095,0	38.095,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.BMA.963.052	Penyediaan Layanan Data Warehouse Walidata LKPP	1,0	Kegiatan	1.271.150,0	1.271.150,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02	Terselenggaranya Platform Manajemen Perkantoran Terintegrasi dan Sistem Pendukung PBJ				1.509.510,0				0,0	0,0	0,0
02.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan		Sistem Informasi/ Modul Aplikasi/ Layanan		1.509.510,0				0,0	0,0	0,0
02.FAB.963	Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	Sistem Informasi		1.509.510,0	5	5	5	0,0	0,0	0,0
02.FAB.963.051	Identifikasi Kebutuhan Pengembangan	1,0	Kegiatan	46.360,0	46.360,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.FAB.963.052	Pengembangan Sistem Aplikasi	5,0	Laporan	292.630,0	1.463.150,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
03	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Informasi TIK yang andal dan responsif				4.529.180,0				0,0	0,0	0,0
03.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit		4.529.180,0				0,0	0,0	0,0
03.CCL.963	Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	10	Unit		4.529.180,0	16	16	16	0,0	0,0	0,0
03.CCL.963.051	Identifikasi Kebutuhan Sarana	1,0	Kegiatan	15.660,0	15.660,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03.CCL.963.052	Penyediaan Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	10,0	Laporan	364.978,3	3.649.783,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
03.CCL.963.053	Pengelolaan Keamanan Informasi	1,0	Laporan	863.737,0	863.737,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
04	Terwujudnya tata kelola Pusdatin dan SPBE yang akuntabel				1.771.013,0				0,0	0,0	0,0
04.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit		1.771.013,0				0,0	0,0	0,0
04.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan		1.771.013,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
04.EBA.963.051	Identifikasi Pengelolaan Layanan	1,0	Kegiatan	51.871,0	51.871,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
04.EBA.963.052	Pengelolaan Layanan Data dan Informasi	1,0	Kegiatan	1.719.142,0	1.719.142,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Total					9.118.948,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Terwujudnya Layanan Data yang Informatif		1.309.245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.309.245,0
01.BMA	Data dan Informasi Publik		1.309.245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.309.245,0
01.BMA.963	Layanan Data Warehouse Walidata LKPP		1.309.245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.309.245,0
01.BMA.963.051	Identifikasi Kebutuhan	Utama	38.095,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38.095,0
01.BMA.963.052	Penyediaan Layanan Data Warehouse Walidata LKPP	Utama	1.271.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.271.150,0
02	Terselenggaranya Platform Manajemen Perkantoran Terintegrasi dan Sistem Pendukung PBJ		1.509.510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.509.510,0
02.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan		1.509.510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.509.510,0
02.FAB.963	Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		1.509.510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.509.510,0
02.FAB.963.051	Identifikasi Kebutuhan Pengembangan	Utama	46.360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46.360,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.FAB.963.052	Pengembangan Sistem Aplikasi	Utama	1.463.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.463.150,0
03	Terwujudnya Layanan PengelolaanInfrastruktur dan KeamananInformasi TIK yang andal dan responsif		4.529.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.529.180,0
03.CCL	OM Sarana Bidang Teknologilnformasi dan Komunikasi		4.529.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.529.180,0
03.CCL.963	Layanan OperasionalInfrastruktur Teknologilnformasi dan Komunikasi		4.529.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.529.180,0
03.CCL.963.051	Identifikasi Kebutuhan Sarana	Utama	15.660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.660,0
03.CCL.963.052	Penyediaan Layanan OperasionalInfrastruktur Teknologilnformasi dan Komunikasi	Utama	3.649.783,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.649.783,0
03.CCL.963.053	Pengelolaan KeamananInformasi	Utama	863.737,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	863.737,0
04	Terwujudnya tata kelola Pusdatin dan SPBE yang akuntabel		1.771.013,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.771.013,0
04.EBA	Layanan Dukungan ManajemenInternal		1.771.013,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.771.013,0
04.EBA.963	Layanan Data danInformasi		1.771.013,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.771.013,0
04.EBA.963.051	Identifikasi Pengelolaan Layanan	Utama	51.871,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51.871,0
04.EBA.963.052	Pengelolaan Layanan Data danInformasi	Utama	1.719.142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.719.142,0
Total			9.118.948,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.118.948,0

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

tttd

HENDRAR PRIHADI